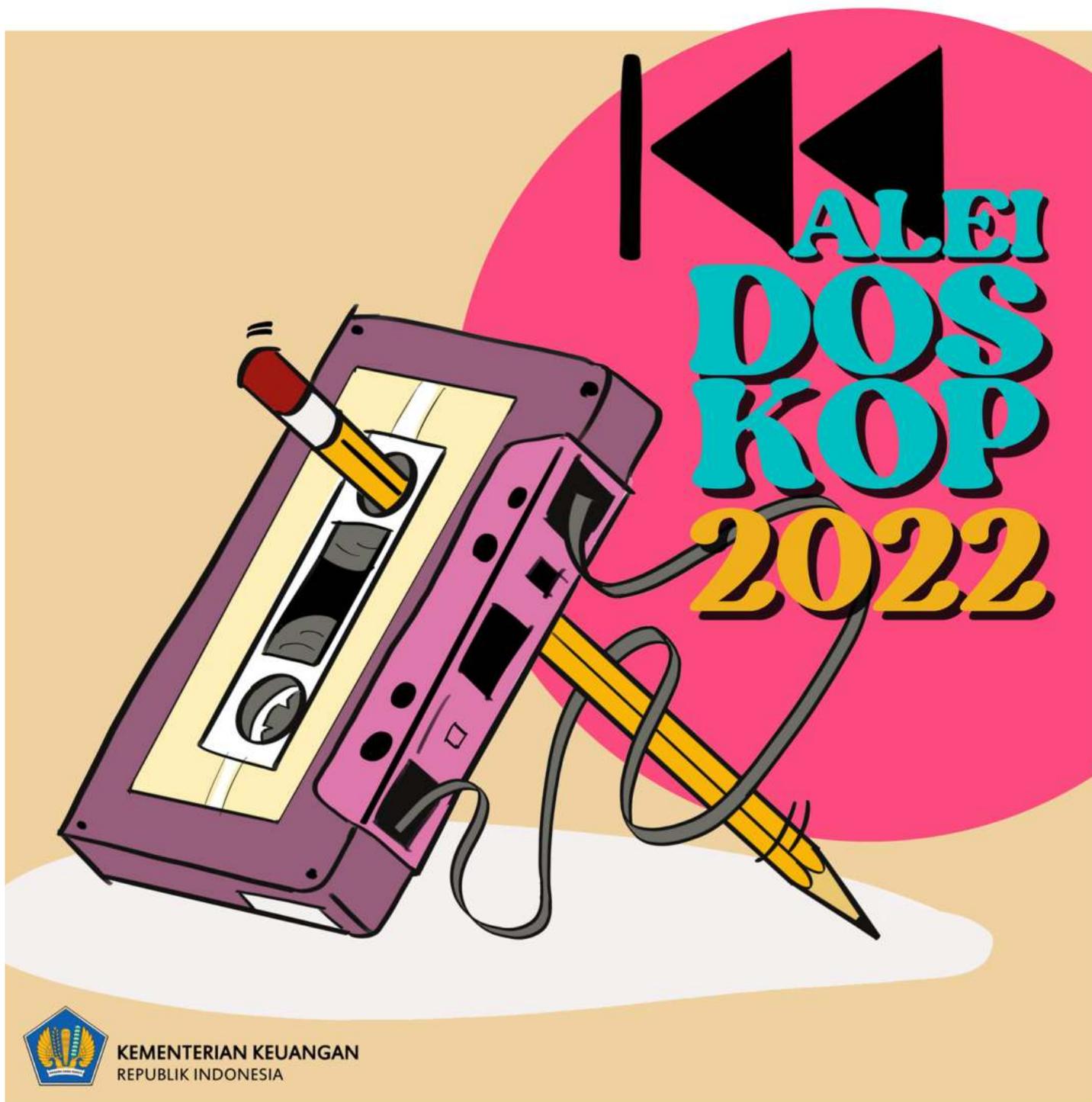


info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**

INFO PASTI EDISI IX - TAHUN 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Pagelaran G20 merupakan salah satu perhelatan dunia terbesar bagi Indonesia di tahun 2022. Selain berskala internasional, Presidensi G20 Tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi anggota G20 sejak forum ini dibentuk pada 1999. Pemerintah Indonesia benar-benar mempersiapkan pagelaran ini secara matang, diharapkan dapat memberikan dampak yang masif bagi tuan rumah maupun dunia.

Ilustrasi sampul oleh
Indyashadi Satya

DITERBITKAN OLEH

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
Edy Gunawan

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Manajemen Teknis, Data, dan Informasi
Mulat Handayani

REDAKTUR PELAKSANA

Kepala Subbagian Kerja Sama dan Komunikasi
Yulia Candra Kusumarini

TIM REDAKSI

Ayu Damelia, Beby Vizca, Ibnu Sujono, Indyashadi Satya, Irfan Murtadho

REDAKTUR FOTO

Irfan Murtadho, Indyashadi Satya

DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Irfan Murtadho, Indyashadi Satya

ALAMAT REDAKSI

Gedung Djuanda 2 Lantai 16,
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

KONTAK

 [pastikanasetkita](#)  [info_pasti](#)

www.romadan.kemenkeu.go.id

call center: 143

KALEIDOSKOP 2022

MULAT HANDAYANI
PEMIMPIN REDAKSI

Kaleidoskop merupakan segala peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara ringkas, pada Majalah Info Pasti edisi IX periode semester II tahun 2022 kali ini bertemakan kaleidoskop yang akan menyampaikan seluruh kegiatan yang diadakan dan diikuti oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selama tahun 2022 dalam satu edisi majalah kali ini.

Pada tahun 2022, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan perhelatan terbesar Indonesia di tahun 2022 yaitu Presidensi G20 Indonesia. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan terlibat banyak dalam kegiatan pengadaan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Presidensi G20 Indonesia dengan baik, optimal, dan membanggakan.

Selama tahun 2022 ini, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan memiliki beberapa kegiatan strategis. Untuk kegiatan strategis yang berkaitan dengan Manajemen BMN antara lain Penataan Ruang Kerja berdasarkan Konsep Activity-Based Workplace, Penggunaan Aset Bersama dalam rangka Efisiensi Biaya

Sewa, Persiapan Implementasi Penggunaan Kendaraan Listrik, Penyelesaian Tindak Lanjut Optimalisasi BMN Terindikasi Idle, Penyelesaian Sertifikasi Tanah di lingkungan Kementerian Keuangan, Pengelolaan dan Penataan BMN di beberapa Kawasan Strategis, Persiapan Pemenuhan Kebutuhan Aset di Ibu Kota Negara Nusantara, Persiapan Sensus BMN Tahun 2023, dan Pembuatan Super Apps Digitalisasi Aset. Sedangkan untuk kegiatan strategis yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain Pembangunan Rumah Susun Negara Kementerian Keuangan pada beberapa daerah, Implementasi Asuransi BMN untuk menanggulangi BMN yang terdampak bencana, Implementasi Program Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, Sentralisasi Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Keuangan, dan Dukungan Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan.

Selain itu, pada tahun ini, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Pengguna Barang Kementerian Keuangan berperan aktif dalam mendukung Kementerian Keuangan meraih beberapa prestasi diantaranya

dalam apresiasi Anugerah Reksa Bandha yaitu Juara 1 untuk Kategori Utilisasi BMN dalam Kelompok III, Juara 2 untuk Kategori Kualitas Pelaporan BMN dalam Kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah Satuan Kerja lebih dari 100 Satuan Kerja, dan Juara 1 untuk Kategori Pemohon Lelang Non-Eksekusi Wajib. Kemudian dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan tahun 2021 serta penghargaan dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini WTP minimal 10 kali dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sejak tahun 2011 hingga tahun 2020.

Akhir kata, diharapkan liputan dan tulisan dalam Majalah Info Pasti ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, serta inspirasi bagi para pembaca. Selanjutnya, untuk menyambut tahun 2023, semoga Indonesia dapat kembali pulih bersama dan lebih kuat.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca!

MONITORING PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN **BMN** DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu mengedepankan nilai-nilai Kemenkeu yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Begitu pula dalam hal pelaksanaan Perencanaan, Pengelolaan dan Penatausahaan BMN, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan memiliki nilai PASTI yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Atas dasar nilai-nilai

tersebut, Kemenkeu akan selalu memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Dalam mandatnya, Kemenkeu memberikan kewenangan Pengguna Barang kepada Biro Madan. Biro Madan melaksanakan Pengelolaan BMN dilandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah.

Pelaksanaan Pengelolaan BMN salah satunya meliputi Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal BMN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Terdapat beberapa perubahan terkait ketentuan Wasdal BMN dari peraturan sebelumnya yang telah dicabut, di antaranya mengenai prosedur, periode serta formulir penyampaian Laporan Wasdal BMN.



PMK 207/2021 tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, sehingga penyampaian Laporan Wasdal di tahun 2022 mulai mengikuti ketentuan pada peraturan tersebut.

Sebagaimana ketentuan pada PMK 207/2021, kegiatan pelaporan Wasdal BMN saat ini dilakukan dalam 2 (dua) periode pelaporan Semesteran dan Tahunan, sehingga disusun 3 (tiga) laporan Wasdal BMN sebagai berikut:

1. Laporan Wasdal BMN Semester I
2. Laporan Wasdal BMN Semester II
3. Laporan Wasdal BMN Tahunan

Kegiatan pelaporan Wasdal BMN dilakukan secara berjenjang yaitu:

1. Kuasa Pengguna Barang kepada Pembantu Pengguna Barang-Wilayah
2. Pembantu Pengguna Barang-Wilayah kepada Pembantu Pengguna Barang-Eselon I
3. Pembantu Pengguna Barang-Eselon I kepada Pengguna Barang
4. Pengguna Barang kepada Pengelola Barang

Adapun Formulir Pelaporan Wasdal BMN tersebut terdiri dari:

1. 65 (enam puluh lima) Formulir Pemantauan Periodik/Insidentil
2. 2 (dua) Formulir Penertiban
3. 14 (empat belas) Formulir Monitoring dan Evaluasi

Selanjutnya, untuk jadwal penyampaian laporan Wasdal BMN pada lingkup Pengguna Barang ialah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Barang kepada Pembantu Pengguna Barang-Wilayah
 - a. Laporan Wasdal BMN Semester I dilaporkan maksimal 7 Juli
 - b. Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan dilaporkan maksimal 16 Januari
2. Pembantu Pengguna Barang-Wilayah kepada Pembantu Pengguna Barang-Eselon I
 - a. Laporan Wasdal BMN Semester I dilaporkan maksimal 13 Juli

- b. Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan dilaporkan maksimal 26 Januari
3. Pembantu Pengguna Barang-Eselon I kepada Pengguna Barang
 - a. Laporan Wasdal BMN Semester I dilaporkan maksimal 16 Juli
 - b. Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan dilaporkan maksimal 3 Februari
4. Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
 - a. Laporan Wasdal BMN Semester I dilaporkan maksimal 19 Juli
 - b. Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan dilaporkan maksimal 15 Februari

Pada hakikatnya pelaksanaan pelaporan kegiatan Wasdal BMN di Kemenkeu dilaksanakan penuh melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang telah disediakan oleh Pengelola Barang DJKN. Berdasarkan surat dari Pengelola Barang disampaikan bahwa terhadap kegiatan pelaporan tersebut sampai dengan saat ini masih dilakukan secara manual, terkait adanya

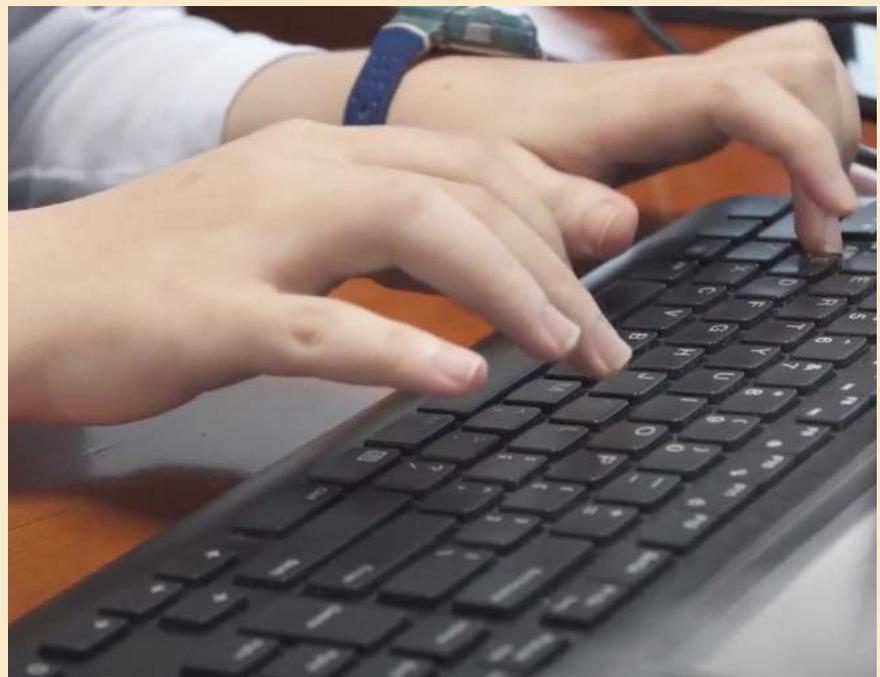
migrasi dan tahap pengembangan aplikasi SIMAN ke versi 2.

Biro Madan berkomitmen menjaga sinergi pada internal maupun eksternal Kemenkeu dan mengutamakan kepuasan stakeholder dalam menjalankan Manajemen BMN di Kemenkeu. Dalam proses pelaksanaan kegiatan Wasdal BMN tahun 2022 ini, Biro Madan selalu mengawal dan membina satuan kerja pada Kemenkeu. Selain itu pada pelaporan wasdal BMN tersebut, dipersiapkan temporary tools agar memudahkan untuk memvalidasi dan monitoring pelaksanaannya.

Harapannya SIMAN versi 2 segera merilis plugin Wasdal BMN sehingga satuan kerja akan lebih mudah dalam menyampaikan pelaporan Wasdal BMN. Oleh karena itu, Biro Madan akan terus berkoordinasi dengan Pengelola Barang DJKN untuk menyampaikan hal-hal yang harus ditindaklanjuti atas persiapan pelaksanaan Wasdal BMN melalui aplikasi SIMAN versi 2.

Teks: Damar Pandu

Foto: Indyashadi Satya



E-SEWA BMN

CARA BARU MENYEWA BMN

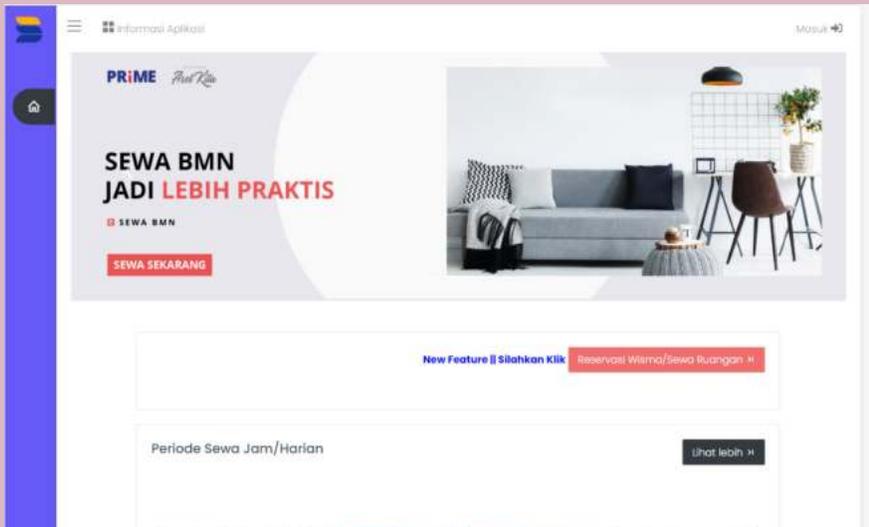
Pada era digital seperti saat ini menyewa barang ataupun jasa lebih efektif jika dilaksanakan menggunakan sebuah platform digital. Hal ini juga merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintahan khususnya Kementerian Keuangan yang memiliki aset yang cukup banyak tersedia untuk disewakan. Saat ini Barang Milik Negara yang disewakan cukup banyak seperti wisma, ruangan, ataupun open space namun kurangnya publikasi dan informasi mengenai BMN yang disewakan ini membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa banyak sekali BMN yang dapat mereka sewa dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.. Ini merupakan sebuah potensi yang sangat besar untuk memberikan tambahan PNBPN bagi Negara ini. Sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu, perbedaan negara maju dengan Indonesia yang merupakan negara

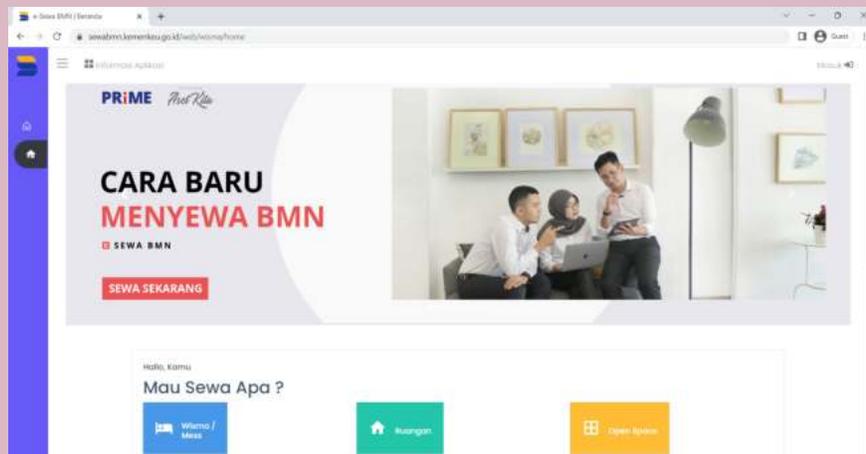
berkembang. "Negara maju asetnya kerja keras sementara mereka bekerja biasa-biasa, sedangkan di Indonesia orangnya bekerja sangat keras sementara asetnya tidur".

Sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan mengembangkan sebuah platform yang disebut dengan e-Sewa BMN. Platform tersebut kini dapat diakses pada laman sewabmn.kemenkeu.go.id. e-Sewa BMN mulai diluncurkan pada Tahun 2020 dengan nerilis versi pertamanya. e-Sewa BMN adalah aplikasi yang dibangun untuk memfasilitasi pengelolaan sewa BMN mulai dari penayangan Katalog Sewa BMN, dokumentasi proses sewa BMN, monitoring status sewa BMN dan PNBPN, serta Dashboard Sewa BMN. Dengan e-Sewa BMN, diharapkan dapat mendorong satuan kerja untuk mengoptimalkan potensi



sewa BMN yang dikelolanya dalam rangka menghasilkan penerimaan negara dari PNBPN sewa BMN. Hal ini didukung dengan penyediaan fitur dalam e-Sewa BMN yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga memudahkan satuan kerja dalam memahami dan mengelola sewa BMN. Disamping itu untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan BMN, ke depan sistem ini juga akan dikembangkan menjadi e-marketplace BMN untuk mengelola seluruh bentuk pemanfaatan BMN (sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna).





Pelaksanaan Sewa BMN itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP Nomor 27 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP Nomor 28 Tahun 2020) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Pada Pasal 1 angka 8 dan Pasal 13 PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dijelaskan Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Untuk periodesitas sewa dikelompokkan per tahun, per bulan, per hari dan per jam.

Perjalanan aplikasi e-Sewa BMN dimulai pada tahun 2020, pada saat itu diluncurkan versi pertamanya dengan fitur untuk memudahkan pengelola BMN dalam melakukan manajemen sewa atas BMN yang dikelolanya. Setahun berselang, diluncurkan versi keduanya. Terdapat fitur tambahan pada versi terbarunya, diantaranya reservasi wisma dan ruangan. Disamping itu juga dilakukan terobosan cara baru menyewa BMN menggunakan pendekatan modern, yaitu dengan mengikuti praktik bisnis e-commerce platform sewa menyewa aset yang diwujudkan melalui pengembangan fitur reservasi wisma, mess,

dan sewa ruangan. e-Sewa BMN merupakan perintis digitalisasi pemanfaatan aset pemerintah yang mengadaptasi praktik bisnis yang berlaku umum dalam pemanfaatan BMN, khususnya sewa menyewa aset.

Implementasi e-Sewa BMN pada satuan kerja pertama kali dilaksanakan oleh dua satuan kerja yang memiliki wisma untuk disewakan yakni GKN Banda Aceh dan KPTIK BMN Denpasar. Wisma GKN Aceh dan Wisma Keuangan Denpasar menjadi produk pertama wisma yang tayang pertama dan tersedia disewakan kepada masyarakat umum. Hingga saat ini sudah banyak BMN yang tersedia untuk disewa pada e-Sewa BMN terutama wisma dan ruangan.

Melalui e-Sewa BMN, pengelolaan sewa BMN menjadi lebih optimal, yaitu dengan memberikan banyak kemudahan dalam proses sewa BMN, baik dari sisi pengelola sewa maupun penyewanya. Dengan kemudahan yang diberikan tersebut, menjadikan proses sewa BMN menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara dari PNBP sewa BMN.

Aplikasi e-Sewa BMN juga meraih penghargaan sebagai Top 5 pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 dan kemudian diikutsertakan

dalam Komperisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB).



Saat ini e-Sewa BMN sudah dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan reservasi wisma atau ruangan layaknya menyewa penginapan pada Online Travel Agent. Pengguna hanya perlu melakukan pendaftaran user kemudian mencari wisma atau ruangan yang tersedia pada lokasi dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan penyewa. Setelah transaksi berhasil dilakukan, wisma sudah terbooking dan penyewa dapat langsung datang di tanggal menginap dan menunjukkan bukti pemesanan. Untuk ruangan penyewa perlu membayarkan uang muka terlebih dahulu agar ruangan ter-booking dengan menghubungi kontak person yang tersedia. Ruangan yang tersedia untuk disewakan antara lain aula atau auditorium, ruang kelas, ruang makan dan lain-lain.

Yuk, tunggu apa lagi, saatnya reservasi wisma atau ruangan untuk segala keperluanmu melalui sewabmn.kemenkeu.go.id!

Teks: Dwi Citra

Foto: sewabmn.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data master aset per 1 Desember 2022, jumlah rumah negara yang dicatat oleh Kementerian Keuangan adalah 10.506 unit. Sementara itu, jumlah pegawai Kemenkeu per 1 Desember 2022 adalah 78.921 orang. Dengan rasio sekitar 1:8, menunjukkan bahwa kebutuhan rumah pegawai Kemenkeu masih jauh dari kata ideal. Tentu saja gap kebutuhan ini bisa bertambah, jika faktor-faktor lain seperti kondisi rumah, lokasi, dan permasalahan sengketa ikut dipertimbangkan.

Kemenkeu bercita-cita memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan mewujudkan rumah layak huni bagi para abdi negaranya. Salah satunya dengan membangun rumah susun negara (rusunara) melalui program bantuan pembangunan rusunara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rencana pembangunan rusunara telah dirintis sejak tahun 2019 dan secara resmi telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan KemenPUPR pada tahun 2020. Secara bertahap, Kemenkeu melalui Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Biro Madan), terus mengawal perencanaan

SEGERA DIBANGUN RUMAH SUSUN PENGABDI NEGARA

RUSUNARA

pembangunan rusunara dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi mewujudkan Rusun Pengabdi Negara.

Dalam perencanaan rusunara, ada serangkaian tahapan yang harus dilalui, yaitu pemetaan wilayah, penyusunan proposal ke Kementerian PUPR, penentuan satker pendamping, penyiapan dokumen kelengkapan, verifikasi teknis, pengurangan jika diperlukan, penetapan lokasi (ground-breaking), dan pembangunan. Proses yang panjang ini tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Harapannya dengan usaha maksimal, hasil yang didapat juga sesuai harapan.

Saat ini, ada sepuluh kota menjadi prioritas pembangunan rusunara, yaitu Jayapura, Merauke, Mimika, Makassar, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Denpasar, Pontianak, Belawan, dan Samarinda. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini antara lain wilayah dengan harga bangunan yang relatif tinggi, ketersediaan lahan yang berpotensi untuk dijadikan lokasi pembangunan, kebutuhan hunian, dan biaya hidup yang cukup tinggi.

Rusunara Kemenkeu yang kini sedang dibangun adalah Jayapura dan Merauke. Sedangkan lokasi lain sedang dipersiapkan untuk pembangunannya antara lain adalah Jakarta Barat, Denpasar, Makassar, dan Mimika.

MARET





yang akan dibangun rusunara Kemenkeu di Kemanggisan, Jakarta Barat. Tujuannya untuk memantau menggali informasi dan memantau terkait dengan kondisi kelayakan lahan dan situasi di lapangan akan keperluan penertiban. Rencana pembangunan rusunara di Kemanggisan, Jakarta Barat ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah negara di Jakarta dengan mempertimbangkan optimalisasi rumah negara yang ada serta adanya rencana pemindahan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur.

Peninjauan Calon Lokasi Rusunara

Pada Desember 2021 sampai dengan Juli 2022, Biro Madan telah melaksanakan peninjauan lokasi calon rusunara, antara lain di Makassar, Jakarta Barat, dan Mimika. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali informasi dan memantau terkait dengan kondisi kelayakan lahan dan situasi di lapangan akan keperluan penertiban yang akan dibangun rusunara, serta menjadi sarana koordinasi dengan satuan kerja setempat terkait persiapan pembangunan rusunara.

Sebelum tutup tahun 2021, Tim Biromadan bersama Tim Kementerian PUPR dan KPTIK BMN Makassar melakukan peninjauan lapangan dan verifikasi teknis ke Kota Daeng, sebutan untuk kota Makassar.



Selanjutnya, pada bulan Maret 2022, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan beserta Tim PUPR: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta, serta perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan peninjauan lapangan sekaligus verifikasi teknis atas lokasi

Pada awal paruh kedua 2022 lalu, Biromadan berkesempatan melakukan peninjauan lapangan calon lokasi rusunara di bagian timur Indonesia, tepatnya di salah satu daerah penghasil emas terbesar di Indonesia, yaitu di Kabupaten Mimika, Papua.

Berdasarkan peninjauan lapangan yang telah dilakukan di masing-masing kota bagian barat, tengah, dan timur Indonesia ini, secara umum lahan yang diusulkan telah memenuhi syarat. Namun demikian, masih diperlukan beberapa tindak lanjut, misalnya pematangan lahan, dan pemenuhan dokumen administrasi. Dengan adanya peninjauan lapangan ini, diharapkan permasalahan di lapangan dapat segera teridentifikasi dan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan rusunara dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Teks: Efi Firmani

Foto: Jeri Martin



MARET

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.



Kebijakan P3DN bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2009, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana diatur jika dalam pengadaan barang/jasa telah terdapat barang/jasa yang ditawarkan yang mempunyai nilai penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai minimal 40% maka wajib menggunakan produk dalam negeri. Namun, implementasinya sendiri masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi serta pengawasan.

Di tahun 2021, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana aturan terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri kembali ditekankan, dan di tahun yang sama juga dilakukan pengawasan terkait implementasi P3DN dan penggunaan barang impor

IMPLEMENTASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI KEMENTERIAN KEUANGAN

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap kebijakan, implementasi, dan pengawasan P3DN yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L/PD.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Salah satunya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam

Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dimana K/L/Pemda selain ditugaskan untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri, juga diinstruksikan untuk membuat aturan terkait insentif, mendorong pembentukan Tim P3DN di masing-masing instansi, perbaikan sistem pembayaran, menambahkan produk dalam negeri yang ditayangkan dalam katalog elektronik, mempermudah proses sertifikasi TKDN, pengawasan terhadap K/L/Pemda dan program-program pendukung lainnya.





Menurut data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2022, Kementerian Keuangan masuk ke dalam 10 besar kementerian/lembaga yang memiliki belanja pengadaan terbesar dan menempati urutan kesepuluh, dengan total belanja pengadaan sebesar Rp11,2 Triliun. Kemudian, dari data belanja pengadaan tersebut, dilakukan identifikasi besaran potensi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan didapatkan bahwa potensi belanja PDN Kementerian Keuangan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp7,8 Triliun atau 70% dari total belanja pengadaan. Maka dari itu, Kementerian Keuangan menyampaikan besar komitmen penggunaan PDN dalam belanja pengadaan sebesar 70%, dan komitmen tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Koordinator

Maritim dan Investasi. Belanja pengadaan Kementerian Keuangan yang semula di awal tahun senilai Rp 11,2T berubah sehingga menjadi Rp 10,57T akibat adanya revisi

anggaran, sehingga target atas komitmen penggunaan PDN yang semula Rp 7,8T berubah menjadi Rp 7,4T. Kedepan, target komitmen senilai 70% akan mengikuti total pagu belanja pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan. Berdasarkan data pengadaan per 5 Oktober 2022, realisasi penggunaan PDN telah mencapai Rp 4,43T atau sekitar 41,91% dari rencana belanja pengadaan barang/jasa TA 2022.

Untuk mempercepat implementasi kebijakan penggunaan PDN di Lingkungan Kemenkeu dan memastikan bahwa target penggunaan PDN tercapai, maka dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kemenkeu melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/2022. Tim P3DN Kemenkeu bertugas untuk menginventarisasi rencana PBJ, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada PBJ pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan PBJ, dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan terkait P3DN di Kemenkeu.

Berbagai upaya untuk turut serta mendukung kebijakan P3DN di Lingkungan Kemenkeu dan memastikan bahwa target komitmen penggunaan PDN sebesar 70% tercapai telah dilakukan oleh Tim P3DN Kemenkeu bersinergi dengan seluruh Unit Eselon I, diantaranya:



1. Nota Dinas Pembinaan

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Kemenkeu adalah dengan mengirimkan nota dinas pembinaan yang berisi sosialisasi kebijakan terkait P3DN, mengutamakan penggunaan PDN dalam PBJ, dan mendorong penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, termasuk katalog elektronik dan digital marketplace (DigiPay, BeLa Pengadaan).

2. Business Matching

Business matching merupakan kegiatan yang mempertemukan antara user, dimana dalam hal ini adalah satuan kerja pemerintah, dan pelaku usaha. Pada kegiatan tersebut, pelaku usaha memperkenalkan produk-produknya yang merupakan PDN atau hasil produksi UMKM/Artisan. Telah dilaksanakan 3 tahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap pertama dilaksanakan secara luring di Bali pada 21-24 Maret 2022.
- b. Tahap kedua dilaksanakan secara hybrid pada 20-21 April 2022 di Smesco Exhibition Hall dan pada 25-26 April di Jakarta Convention Center.
- c. Tahap ketiga dilaksanakan secara daring pada 23-27 Mei 2022. Kemenkeu mengundang 15 asosiasi dan prinsipal yang barang/jasanya banyak digunakan dalam PBJ di lingkup Kemenkeu, diantaranya Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI), Asosiasi Perusahaan Lift dan Escalator Indonesia (GAPENDO), PT Zyrexindo Mandiri Buana, Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO), dan lain-lain. Asosiasi dan pelaku usaha diminta untuk mempresentasikan produk-produknya kepada seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan.
- d. Tahap keempat dilaksanakan secara luring pada 6-7 Oktober 2022 di Bali. Acara diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan mengundang K/L/P/D serta pelaku usaha yang terdiri dari asosiasi dan penyedia barang/jasa dengan tujuan menelaraskan sisi demand dan supply untuk mewujudkan percepatan program penggunaan PDN.



3. Substitusi Impor

Seluruh Unit Eselon I diminta untuk mengidentifikasi belanja impornya dan mencari strategi pengurangan penggunaan produk impor maupun substitusi PDN dari barang/jasa impor tersebut.

4. Focus Group Discussion P3DN

Untuk menyamakan persepsi tentang program peningkatan penggunaan PDN dalam PBJ pemerintah dan pengembangan usaha kecil, mendapatkan gambaran dan informasi mengenai proses pengadaan (tahap perencanaan, persiapan, pemilihan) untuk mendukung kebijakan P3DN dalam PBJ pemerintah dan pengembangan usaha kecil, dan memperoleh pemahaman dan acuan yang benar untuk penggunaan produk dalam negeri yang sesuai dengan peraturan. FGD P3DN diselenggarakan pada 18 Maret 2021 dengan mengundang narasumber dari LKPP dan Kemenperin selaku pembina P3DN. Pembahasan yang disampaikan yaitu aturan terkait P3DN dan penerapan kebijakan penggunaan PDN dalam PBJ.

5. Rapat Koordinasi dengan Unit Eselon I

Melalui rapat koordinasi PBJ yang dilaksanakan pada Triwulan II dan III TA 2022, tim P3DN Kemenkeu senantiasa mengingatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak-pihak terkait PBJ untuk selalu mengutamakan penggunaan PDN, dengan terlebih dahulu memeriksa ketersediaan barang/jasa PDN pada laman inventarisasi PDN milik Kemenperin.





6. Peningkatan Peran Serta Pokja Pemilihan dan Penyusunan Petunjuk Teknis P3DN Selain pada pihak terkait di Unit Eselon I, pembinaan juga dilakukan terhadap Pokja Pemilihan yang bertugas untuk melaksanakan tender. Di dalam pembinaan tersebut, Pokja Pemilihan diajak turut membantu memastikan satuan kerja telah mengutamakan PDN dalam PBJ diantaranya dengan mengkonfirmasi kepada PPK tentang pemanfaatan PDN, mengingatkan peserta tender/seleksi untuk mengutamakan PDN pada tahapan pemberian penjelasan, serta meminta calon penyedia untuk menyampaikan komitmen penggunaan PDN pada tahap klarifikasi. Di dalam seluruh dokumen pengadaan dan pada tahapan kaji ulang, Pokja Pemilihan selalu menegaskan untuk mengedepankan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan, dan proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan TKDN terkait. Lebih lanjut, telah diterbitkan juga Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan P3DN yang berisi pedoman penerapan kebijakan P3DN dalam tahapan pemilihan penyedia dan juga kertas kerja untuk membantu Pokja Pemilihan dalam memastikan bahwa baik PPK maupun calon penyedia telah mendahulukan penggunaan PDN.

7. Workshop P3DN Dalam rangka meningkatkan pemahaman PPK dan Staff PPK terkait kebijakan P3DN maka serta bimbingan teknis pengisian aplikasi Sistem Pengawasan P3DN kepada satuan kerja, dilakukan workshop P3DN yang dilaksanakan bersama Unit Eselon I. Agar belanja produk dalam negeri di Kemenkeu dapat lebih maksimal, telah disusun rencana aksi sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan K/L teknis seperti Kemenkomarves, Kemenperin, LKPP, dan BPKP, lalu koordinasi dengan seluruh UE I dalam rangka penggunaan PDN dalam PBJ, serta koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan

- dan Inspektorat VI terkait percepatan pelaksanaan PBJ
2. Pembinaan kepada seluruh KPA dan PPK di lingkungan Kemenkeu melalui sosialisasi, workshop, naskah dinas pembinaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya
3. Penguatan perencanaan pengadaan yang mengutamakan penggunaan PDN
4. Peningkatan kapasitas Tim P3DN, serta rapat koordinasi secara berkala
5. Asistensi implementasi kebijakan P3DN untuk seluruh satuan kerja di seluruh Lingkungan Kemenkeu
6. Monitoring pelaksanaan penggunaan PDN di lingkungan Kemenkeu
7. Kebijakan pengurangan penggunaan produk impor dalam pelaksanaan PBJ
8. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi PBJ dan keuangan (e-katalog, e-kontrak, SAKTI, BeLa Pengadaan, Digipay).

Pemerintah Indonesia memiliki buying power yang besar, jika dimanfaatkan untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri akan meningkatkan proses industrialisasi dan menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Teks: Annisa Rachmanita
Foto: Beby Vizca





Menurut Thomson (1967), suatu organisasi harus bisa mengelola ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan hal yang pasti terjadi di dunia, satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Menurut Small dan Downey (1996), ketidakpastian merupakan penyebab kegagalan suatu organisasi. Ketidakpastian yang terjadi ini memicu perubahan dalam suatu lingkungan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu perubahan merupakan keniscayaan dalam dunia ini, setiap hal pasti akan mengalami perubahan.

Setiap hal harus memiliki kemampuan adaptasi dan agility yang handal untuk merespon perubahan untuk dapat terus bertahan dan bersaing. Salah satu objek perubahan adalah organisasi, dimana situasi dan kondisi yang ada memaksa organisasi untuk terus berbenah dan beradaptasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan jaman. Menurut Yusuf, Sarhadi, dan Gunasekaran (1999), mendefinisikan agility organisasi yaitu suatu keberhasilan organisasi untuk mengeksplor sumber daya yang berdasarkan pada aspek kompetitif (kecepatan, fleksibilitas, inovasi, proaktif, kualitas, dan profitabilitas), dimana sumber daya yang ada diintegrasikan dan dikonfigurasi ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan tuntutan dari pelanggan demi mendapatkan bentuk praktik terbaik.

TRANSFORMASI

BIRO MANAJEMEN BMN DAN PENGADAAN

AGILITY MENGHADAPI PERUBAHAN

APRIL

Agility bukan Pilihan tapi Keharusan

Kemampuan organisasi dalam mengantisipasi dan merespon perubahan untuk dapat bertahan dan berkembang merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seluruh bentuk organisasi. Tidak satupun organisasi dapat bertahan dalam pasar apabila tidak memiliki kapabilitas tersebut, tanpa kemampuan tersebut, suatu organisasi akan tertinggal dan pada akhirnya akan kalah dan terlupakan.

Kemampuan organisasi merespon perubahan adalah bagaimana suatu organisasi dapat merespon dinamika yang ada untuk mendapatkan suatu formula terbaik melalui inovasi dan adaptasi dalam lingkungan untuk memenuhi ekspektasi yang ada.

Reorganisasi merupakan Upaya Perubahan

Dalam suatu organisasi perubahan dilakukan untuk menuju kesempurnaan, perubahan dilakukan untuk dapat merespon perkembangan yang terjadi di pasar/ lingkungan. Kadang kala, perubahan dalam suatu organisasi dapat memantik dinamika

internal dalam suatu organisasi, namun hal tersebut merupakan hal yang sangat biasa terjadi dalam dinamika organisasi.

Dinamika yang ada akan dapat diatasi dengan kepemimpinan yang baik serta kesadaran dari seluruh elemen organisasi. Pada dasarnya reorganisasi akan dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik bagi seluruh elemen internal dan eksternal.

Reorganisasi dalam Pelayanan Publik

Reorganisasi dalam aspek layanan publik biasa dilakukan untuk merespon keinginan publik/ masyarakat untuk mendapatkan layanan yang semakin baik. Perubahan tersebut didasari oleh perubahan peraturan serta kebijakan dari pimpinan pusat. Berdasarkan hal tersebut, organisasi layanan publik akan merespon dengan melakukan perubahan dalam aspek organisasi.

Reorganisasi dalam organisasi sektor publik pada dasarnya dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Bentuk

peningkatan kualitas yang diharapkan antara lain simplifikasi layanan, peningkatan kualitas layanan, percepatan layanan, dan hal-hal lain yang diharapkan dapat memudahkan pelayanan publik.

Reorganisasi adalah Perubahan Pola Pikir

Dalam pelaksanaan reorganisasi, tidak melulu soal mengubah kotak jabatan dalam suatu organisasi, hal yang lebih penting adalah bagaimana suatu organisasi bisa lebih tajam dan matang dalam mengelola perubahan yang ada serta elemen dalam organisasi tersebut bisa mengubah pola berpikir dengan tujuan mencapai kinerja terbaik organisasi.

Salah satu elemen yang dimaksud adalah anggota organisasi tersebut, dalam hal ini adalah pegawai/ASN yang bekerja dalam lingkup organisasi tersebut. Dengan adanya reorganisasi dan penajaman fungsi, diharapkan para pegawai dapat bekerja dengan paradigma baru sehingga dapat tercapai tujuan besar atas reorganisasi tersebut.



Reorganisasi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan

Pada tahun 2022 ini, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melakukan perombakan dalam lingkup organisasi dengan merampingkan organisasi. Hal ini tidak lepas dari arahan nasional terkait delayering organisasi. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan memangkas jumlah jabatan Eselon III dari semula 8 unit Eselon III menjadi 6 Unit Eselon III, serta merampingkan jumlah unit Eselon IV dibawahnya.

Sebelumnya terdapat 8 unit Eselon III di Biro Madan, yaitu:

1. Bagian Perencanaan
2. Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja
3. Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan
4. Bagian Utilisasi dan Optimalisasi BMN
5. Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN
6. Bagian Penatausahaan BMN
7. Bagian Dukungan Teknis
8. Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi

Selanjutnya, berikut penjabaran perubahan organisasi Biro Madan:

1. Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja
 - Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I
 - Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II
 - Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III
 - Subbagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Perencanaan BMN
 - Subbagian Perencanaan BMN I

- Subbagian Perencanaan BMN II
 - Subbagian Perencanaan BMN III
3. Bagian Pengelolaan BMN
 - Subbagian Pengelolaan BMN I
 - Subbagian Pengelolaan BMN II
 - Subbagian Pengelolaan BMN III
 - Subbagian Pengelolaan BMN IV
 4. Bagian Penatausahaan BMN
 - Subbagian Penatausahaan BMN I
 - Subbagian Penatausahaan BMN II
 - Subbagian Penatausahaan BMN III
 - Subbagian Penatausahaan BMN IV
 5. Bagian Manajemen Pengadaan
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa I
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa II
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa III
 6. Bagian Manajemen Teknis, Data, dan Informasi
 - Subbagian Pengelolaan Pengguna dan Verifikasi
 - Subbagian Kerja Sama dan Komunikasi
 - Subbagian Kompetensi BMN dan Pengadaan
 - Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi
 7. Kelompok Jabatan Fungsional





Secara kasat mata, perubahan yang terlihat adalah penggabungan Bagian Utilisasi dan Optimalisasi BMN dengan Bagian Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN menjadi Bagian Pengelolaan BMN, serta penggabungan Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi dengan Bagian Dukungan Teknis menjadi Bagian Manajemen Teknis, Data, dan Informasi, serta perubahan nomenklatur dari Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan menjadi Bagian Manajemen Pengadaan.

Terlihat sederhana, namun secara filosofi ada perubahan mendasar dan penajaman fungsi dari reorganisasi tersebut. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi proses bisnis dan birokrasi, serta penajaman fungsi dari bagian-bagian yang ada di lingkungan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, tidak hanya bagian yang mengalami perubahan/penggabungan namun seluruh elemen Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.

Reorganisasi tanpa Perubahan Pola Pikir adalah Tindakan yang Sia-sia

Hal terakhir yang perlu disampaikan adalah, suatu organisasi dapat mengklaim telah

mencapai kesempurnaan dan dapat mengatasi segala permasalahan dengan melakukan reorganisasi namun segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi dapat dikatakan sia-sia jika dalam organisasi tersebut gagal dalam perubahan pola pikir. Akan terasa sia-sia jika reorganisasi hanya mengubah kulit organisasi saja tanpa ada perubahan dalam pola pikir dan pola kerja yang ada. Reorganisasi dilakukan tidak semata untuk mengubah jumlah jabatan, namun harus bisa meningkatkan kinerja, kemudahan

pelayanan, perbaikan birokrasi, efisiensi sistem kerja dan berbagai hal positif lainnya yang diharapkan dapat didapatkan dengan melakukan reorganisasi.

Dapat disimpulkan dan harus dijadikan pegangan oleh seluruh elemen organisasi, Reorganisasi tanpa perubahan pola pikir hanya tindakan yang sia-sia.

Teks: Gayuh Ardhi

Foto: Jeri Martin



KALEIDOSKOP **MENGAWAL** ITRP

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi Secara Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mendasarkan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Adapun hasil yang ingin dicapai dari Reformasi Birokrasi (RB) adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan handal sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dievaluasi oleh Menteri PANRB menggunakan Permen-PANRB nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analistik holistik. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi yang mewujudkan birokrasi yang bersih dan

akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi dilakukan dalam rangka memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment) yang diukur setiap tahun, dimana digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Penilaian terhadap setiap

program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut sehingga diharapkan program tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform, sedangkan kategori pengungkit terdiri dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.





Program Reformasi Birokrasi dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector yang biasa disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi yang menjadi leading sector program bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya. Dalam sektor pengadaan, LKPP berperan sebagai leading sector, khususnya ITKP Minimal Baik. ITKP Minimal Baik ini selanjutnya berperan sebagai aspek Indikator 'antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi., yang mana merupakan indikator aspek hasil 'antara' pada kategori pengungkit tata laksana.

Selanjutnya, LKPP beberapa kali mengeluarkan surat edaran tentang penjelasan ITKP minimal baik sebagai aspek indikator 'antara' dalam indeks Reformasi Birokrasi terakhir melalui SE LKPP nomor 4 tahun 2021. ITKP minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan
 - e. E-Kontrak.

2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Adapun yang perlu menjadi perhatian adalah masing-masing indikator memiliki Batasan Waktu cut off penilaian yang harus disadari dan dipahami semua pihak terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Untuk indikator pemanfaatan sistem, hasil yang dinilai adalah pelaksanaan pengadaan pada tahun sebelumnya (tanggal 31 Desember t-1), kecuali untuk SIRUP data yang digunakan adalah data tahun anggaran berjalan (s.d 31 Maret t).
2. Untuk indikator kualifikasi dan kompetensi SDM data diukur untuk pemenuhan dibanding formasi hingga 31 Oktober tahun berjalan.
3. Untuk Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ, data aktual ditarik pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan.



Predikat penilaian ITKP adalah berikut:

1. 100 = Istimewa;
2. 90 s.d 99 = Sangat Baik;
3. 70 s.d 90 = Baik;
4. 50 s.d. 70 = Cukup, dan;
5. < 50 = kurang.

Penilaian yang sudah dilakukan sejak tahun 2020 dengan hasil untuk Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Tahun 2020

Kementerian Keuangan mendapatkan nilai 60 (Cukup), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dengan bobot 50%
 - Pemenuhan JF PPBJ di lingkungan Kemenkeu tahun 2020 terpenuhi 28% dari total formasi sehingga diberi nilai 20. Dengan pembobotan sebesar 50% mendapat perolehan nilai 10 (50% dari 20)
 - Kendala yang dihadapi: (a) Nilai pembagi adalah dari total formasi, sementara target pemenuhan formasi tidak dilakukan pada satu tahun; (b) Ketertarikan SDM pada jabatan JFPPBJ diantaranya dengan pertimbangan risiko; (c) Persyaratan inpassing JFPPBJ yang cukup berat (di antaranya harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun di PBJ, sementara peminat JFPPBJ sulit memenuhi berkas administrasi yang disyaratkan); dan (d) Perhitungan strategi pola karir.
2. Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan bobot 50%
 - UKPBJ Kemenkeu mencapai 9/9 level proaktif, diberi nilai 100. Dengan pembobotan sebesar 50% mendapat perolehan nilai 50 (50% dari 100).
 - UKPBJ Kemenkeu termasuk K/L pertama yang mendapat predikat kematangan proaktif dari LKPP.





3. Total peroleh nilai dari kedua Indikator tersebut diatas mencapai 60 ((50% \times 20)+(50% \times 100)) sehingga pencapaian nilai 60 menjadikan Tata Kelola PBJ Kemenkeu mendapatkan predikat “Cukup” dan termasuk ke dalam 5 K/L yang memiliki Indeks Tata Kelola tertinggi dari 75 K/L yang dilakukan Penilaian Indeks Tata Kelola PBJ oleh LKPP, sebagai berikut:

- Satu (1) K/L mendapat predikat “Sangat Baik” yaitu Kemendikbud;
- Satu (1) K/L mendapat predikat “Baik” yaitu LKPP;
- Tiga (3) K/L mendapat predikat “Cukup” yaitu Kemenkeu, BKN, dan LAPAN;
- Tujuh puluh (70) K/L mendapat predikat “Kurang”.

Tahun 2021

Kemenkeu mendapatkan nilai 77,93 (Baik), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan sebesar 30%, terdiri dari:
 - Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebesar 10%.

Untuk indikator ini Kemenkeu mendapatkan nilai 0.

- E-Tendering/E- Seleksi sebesar 20%. Untuk indikator ini Kemenkeu mendapatkan nilai 20.
- 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ sebesar 30% Untuk indikator ini Kemenkeu mendapatkan nilai 17.93.
- 3. Tingkat Kematangan UKPBJ sebesar 40% Untuk indikator ini Kemenkeu mendapatkan nilai 40.

dengan skor Pencapaian 77,93 menjadikan Tata Kelola PBJ Kemenkeu mendapatkan predikat “Baik” dan termasuk ke dalam 9 K/L yang memiliki ITKP tertinggi dari 83 K/L dengan penilaian nilai ITKP LKPP, sebagai berikut:

- Tidak ada K/L berpredikat “Sangat Baik”;
- 9 (sembilan) K/L berpredikat “Baik” yaitu BPPOM (70,88), BSSN (74,24), Kemenkumham (75,28), Kemenkeu (77,93), Kemendikbudristek (90), Kemenhub (76,25), Polri (73,27), LIPI (72,22), LKPP (85,28);
- 12 (dua belas) K/L berpredikat “Cukup”;
- 62 (enam puluh dua) K/L berpredikat “Kurang”.

Secara umum Kementerian Keuangan menduduki peringkat ke 3 dibawah Kemendikbudristek dan LKPP.

Tahun 2022

Hasil Penilaian ITKP 2022 Kementerian Keuangan secara resmi belum dikeluarkan oleh LKPP, namun serangkaian upaya telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 untuk meningkatkan skor capaian dengan kriteria tetap baik (di atas 70). dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan sebesar 30%, terdiri dari:
 - Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebesar 10%.
 - E-Tendering/ E- Seleksi sebesar 5%.
 - E purchasing sebesar 5%
 - NonE-Tendering & NonE-Purchasing sebesar 5%.
 - E Kontrak sebesar 5%
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ sebesar 30%
3. Tingkat Kematangan UKPBJ sebesar 40%

Pada tanggal 7 November 2022 LKPP telah mengeluarkan hasil sementara penilaian ITKP tahun 2022, dimana Kementerian Keuangan memperoleh skor sementara 80,2 (baik) dengan Rincian per Indikator RUP (10), E tendering (5), E Purchasing (3,9), Non E tendering/Non e Purchasing (0), E kontrak (1,1), Kualifikasi dan Kompetensi SDM (20,2), Kematangan UKPBJ (40). Secara umum sudah cukup baik, namun penggunaan aplikasi non e tendering dan pengisian E kontrak perlu menjadi prioritas perhatian untuk ditingkatkan.





Tahun 2023

Untuk tahun 2023 kriteria penilaian relatif masih sama dengan tahun 2022, dan mayoritas penilaian dilakukan atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, maka serangkaian upaya telah dan akan dilakukan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan berkoordinasi dengan Unit Eselon I, serta LKPP melaksanakan serangkaian upaya untuk meningkatkan ITKP melalui:

1. Pembentukan skuad tim teknis ITKP
2. Melaksanakan kegiatan workshop penggunaan dan pengisian aplikasi pengadaan
3. Mengirimkan beberapa nota dinas pembinaan kepada Unit Eselon
4. Pembuatan juknis pemanfaatan aplikasi
5. Membuat forum FGD dengan mengundang narasumber LKPP
6. Koordinasi recomposisi formasi untuk mempercepat pemenuhan pengangkatan jafung PBJ sesuai jenjang yang tersedia.
7. Koordinasi pengawalan kematangan UKPBJ
8. Monitoring capaian melalui Dashboard Bersama ITKP

Selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama agar capaian ITKP Kemenkeu dapat ditingkatkan diantaranya:

- Mengawal pengisian RUP dengan baik, mengingat pagu dalam RUP akan menjadi angka pembagi untuk beberapa indikator pemanfaatan sistem lainnya. Pengisian RUP harus sesuai petunjuk, misalnya terkait pemilihan metode pemilihannya. Untuk paket yang berubah/batal, dapat dilakukan perubahan/pembatalan sesuai juknis yang diberikan.
- Memberikan masukan kepada LKPP terkait perbaikan persentase penilaian dan indikator, khususnya terkait SDM PBJ, mengingat formasi yang ada dicadangkan untuk beberapa kenaikan jenjang dari JF PPBJ sehingga kurang mencerminkan



nilai sebenarnya jika membandingkan keterisian dengan formasi yang tersedia.

- Membangun dan mendorong awareness dan komitmen satuan kerja pada Unit eselon I atas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dengan lebih baik, dan perlu monitoring bersama secara berkala.
- Pertukaran data realtime dan membangun persepsi yang sama dengan LKPP atas hal-hal yang dinilai, melalui kegiatan diskusi maupun sarana komunikasi lainnya.
- Meningkatkan peran helpdesk untuk mengatasi permasalahan penggunaan aplikasi, khususnya terkait ITKP.

Dengan kolaborasi yang baik antara para pihak terkait di Lingkungan Kementerian Keuangan, diharapkan Indikator Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dapat dicapai dan mendukung tercapainya tujuan strategis Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, hal tersebut diharapkan dapat menciptakan value added yang bisa atau dikontribusikan, melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang baik di Kementerian Keuangan.

Teks: Harmoko Widodo

Foto: M. Ibnu Sujono

TRANSFORMASI PERENCANAAN DARI KEBIJAKAN HINGGA APLIKASI

BMN

Memasuki tahun ke-8 penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terpilih sebagai piloting project kementerian yang melaksanakan kebijakan baru dalam penyusunan RKBMN tahun 2024. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.06/2022 tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga.

Penyusunan RKBMN tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (PMK No.153/2021), yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu PMK No.150/PMK.06/2014,

yang setelah sewindu menjadi payung hukum dalam penyusunan dan perubahan RKBMN.

Lalu, apa saja transformasi perencanaan RKBMN? Terdapat 5 (lima) substansi perubahan kebijakan dalam penyusunan perencanaan BMN, yaitu 1) Perluasan bentuk perencanaan BMN; 2) Penambahan objek RKBMN; 3) Penambahan parameter untuk kriteria perubahan RKBMN; 4) Penambahan Daftar Pemeliharaan BMN; dan 5) Penegasan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dalam penyusunan RKBMN.

Pada penyusunan RKBMN 2024, terdapat perluasan bentuk perencanaan RKBMN, yang semula hanya ada 2 bentuk yaitu pengadaan dan pemeliharaan, menjadi 5 bentuk yaitu

pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Selain itu, perencanaan asuransi yang semula disusun terpisah dengan RKBMN, mulai tahun ini akan disusun bersamaan dengan penyusunan RKBMN.

Sebelum PMK No.153/2021 terbit, sejak 2019 Kemenkeu telah menyusun Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN (RP4) di lingkungan Kemenkeu, yang disusun setiap tahun untuk periode 3 tahun. Pengalaman satuan kerja dalam menyusun RP4 selama ini selanjutnya diharapkan dapat memudahkan satuan kerja dalam menyusun RKBMN Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN tahun ini.





Selain perluasan bentuk perencanaan, terdapat juga penambahan objek RKBMN Pengadaan dan RKBMN Pemeliharaan. Objek RKBMN Pengadaan saat ini mengacu pada PMK No. 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) BMN, yang semula hanya bangunan gedung kantor, bangunan rumah negara, dan kendaraan jabatan, kemudian ditambah dengan bangunan pendidikan, bangunan pengadilan, bangunan tahanan, dan kendaraan operasional. Sementara untuk objek RKBMN Pemeliharaan mencakup seluruh BMN, baik tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan.

RKBMN Pemeliharaan disusun terhadap BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) serta memiliki kondisi baik atau rusak ringan. Salah satu hal baru yang perlu

disusun dan diperhatikan dalam penyusunan RKBMN Pemeliharaan adalah Daftar Hasil Pemeliharaan (DHP) BMN, yaitu dokumen yang memuat informasi mengenai pemeliharaan dalam satu tahun anggaran atas BMN yang dikuasai PB/KPB.

Perubahan kebijakannya selanjutnya adalah adanya penambahan parameter untuk kriteria perubahan RKBMN, yang sebelumnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat revisi anggaran, kini ditambah dengan dua parameter lain, yaitu: 1) perubahan organisasi yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN, berdasarkan persetujuan menteri yang mempunyai tugas di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan 2) perubahan mekanisme pemenuhan kebutuhan pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.

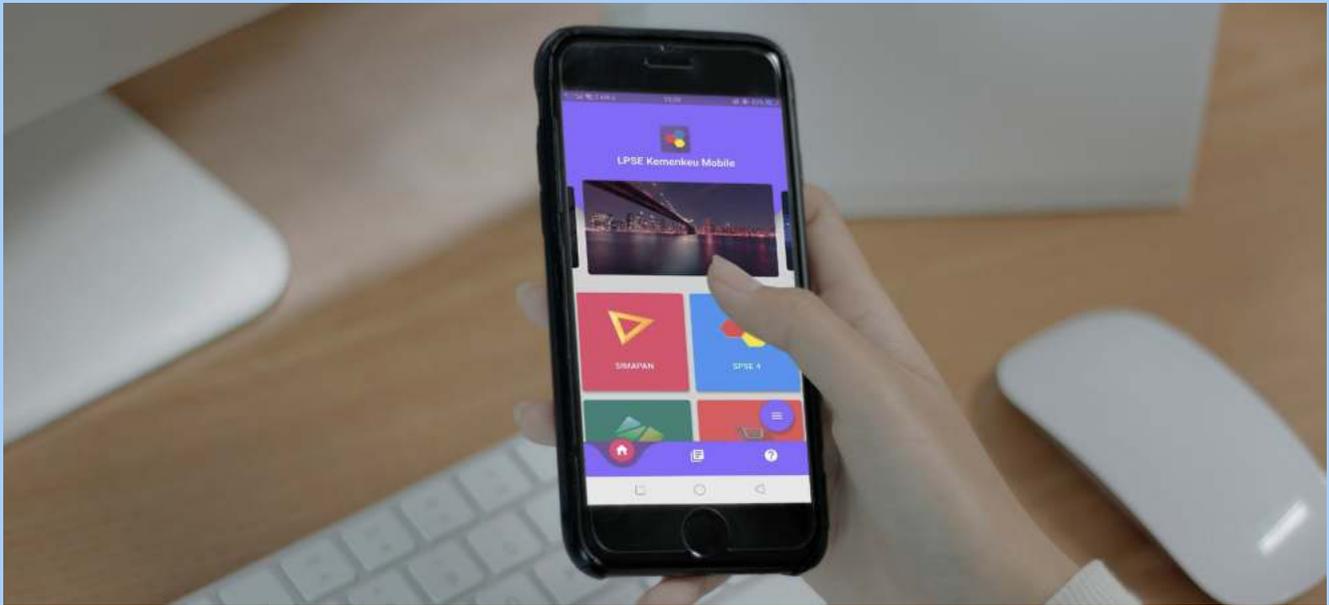
Selama ini proses perencanaan kebutuhan BMN dilakukan melalui Aplikasi SIMAN. Namun dalam PMK No.153/2021, ditegaskan kembali dan disempurnakan penggunaan sistem Workflow and Approval (OTP), sehingga penyusunan RKBMN lebih ramah lingkungan (paperless) dan prudent. Aplikasi SIMAN yang akan digunakan untuk penyusunan RKBMN tahun 2024 berbeda dengan SIMAN versi sebelumnya, sehingga dikenal dengan SIMAN versi 2.



SIMAN versi 2 dikembangkan untuk mempermudah penyusunan perencanaan BMN sesuai dengan PMK No.153/2021. Selain sebagai alat bantu, Aplikasi SIMAN versi 2 juga sebagai wujud digitalisasi dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang sebelumnya masih harus ditetapkan secara manual. Jika dalam SIMAN versi 1, Hasil Penelaahan RKBMN harus ditetapkan dulu secara manual, maka dalam SIMAN versi 2, Hasil Penelaahan ditandatangani secara sistem dan terkoneksi dengan Aplikasi Persuratan Kemenkeu, Aplikasi Nadine.



Teks: Efi Firmani
Foto: Ayu Damelia



Dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, secara eksplisit diuraikan hubungan antara Presiden, Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), dan Menteri Negara/Pimpinan Lembaga yang menjalankan fungsi Chief Operational Officer (COO). Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan atau sebagai Chief Financial Officer (CFO) berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan kewajiban negara secara nasional. Sedangkan para menteri dan pimpinan lembaga negara pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO), termasuk Menteri Keuangan itu sendiri, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam hal Pengelolaan BMN, Menteri Keuangan selaku CFO bertindak sebagai Pengelola Barang. Yang dalam hal ini, secara teknis tugas Pengelola Barang dikuasakan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sedangkan sebagai COO, menteri keuangan sebagai Pengguna Barang yang dikuasakan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Sebagai Pengelola Barang, Menteri Keuangan c.q.

DJKN bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebagai Pengguna Barang, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku unit yang dikuasakan, mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan kata lain, Menteri Keuangan (sebagai Pengguna Barang) melakukan tugas pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang dibuat oleh Menteri Keuangan sendiri (selaku Pengelola Barang).

Dalam 5 tahun terakhir, DJKN begitu gencar dalam melaksanakan program-program

strategis terkait pengelolaan BMN dalam rangka menuju Distinguished Asset Manager. Mulai dari pelaksanaan Revaluasi BMN tahun 2017, penyusunan RKBMN pertama untuk tahun 2018, Implementasi SAKTI tahun 2017-2018, Perbaikan Revaluasi tahun 2019, Pelaksanaan asuransi BMN Tahun 2019, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang terbaru, tentunya adalah implementasi/migrasi data dari aplikasi SIMAN v1 ke SIMAN v2 yang mulai diimplementasikan pada Kementerian Keuangan di tahun 2022 ini. Implementasi SIMAN v2 akan dimulai dengan migrasi data pada plugin master aset, dan penyusunan RKBMN tahun 2022. Ke depannya, secara bertahap SIMAN v2 akan secara penuh digunakan untuk seluruh proses pengelolaan BMN (inventarisasi, wasdal, perencanaan, pengelolaan, penertiban, dll).

KISAH DI BALIK PILOT PROJECT

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Setjen Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang, yang masih saudara kandung dengan DJKN selaku Pengelola Barang, selalu menjadi kelinci percobaan atau yang lebih elegan biasa disebut sebagai “pilot project” dari setiap project atau regulasi baru dari Pengelola Barang. Dengan kedekatan hubungan pengguna dan pengelola barang dalam satu kementerian, tentunya DJKN berharap adanya feedback yang memadai dari pengguna barang sebagai bahan penyempurnaan regulasi sebelum diterapkan secara nasional pada seluruh K/L.

Namun, menjadi yang pertama, menjadi pilot project, atau menjadi kelinci percobaan tidak seindah seperti yang dibayangkan. Salah satu hal positif yang diperoleh dari status pilot project adalah kenyataan bahwa akan menjadi pihak yang pertama tahu dan mencoba aplikasi/regulasi baru dari Pengelola Barang. Selebihnya adalah cerita-cerita tentang hambatan, kendala, tantangan, dan ketersampingan yang akan dialami. Seperti cerita bagaimana Kementerian Keuangan ditarget untuk menyelesaikan pelaksanaan revaluasi dalam waktu kurang dari 5 bulan, padahal objeknya mencapai 20 ribu barang.

Bagaimana Kementerian Keuangan harus siap beralih menggunakan aplikasi SAKTI dengan keterbatasan infrastruktur, pengetahuan, dan SDM yang kompeten. Bagaimana Kementerian Keuangan harus mendesain konsep koreksi revaluasi, dan melakukan eksekusinya tanpa ada kejelasan payung hukum maupun juknis yang memadai dari pihak regulator. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya yang sama menantanginya dengan cerita di atas.

Hambatan dan tantangan selama menjadi pilot project mengharuskan Pengguna Barang untuk terus belajar. Bukan sekedar belajar menggunakan aplikasi, namun juga belajar konsep dan dasar yang melandasi dari suatu project sehingga dapat memberikan feedback yang signifikan. Komunikasi yang intens antara pengguna barang dengan pengelola barang membuat suasana menjadi lebih cair dan mengalir. Sehingga tidak jarang Pengguna Barang terlibat lebih jauh dari sekedar menjadi pilot project, namun juga menjadi partner yang konstruktif terhadap project-project dari pengelola barang. Berbagai masukan, pendapat, kritik, dan saran yang dimunculkan sering kali dapat berpengaruh signifikan terhadap project yang sedang dikembangkan. Sinergi ini lah yang harus terus dijaga,

dan dipertahankan dalam project-project berikutnya yang diyakini masih ada banyak lagi.

Kedepannya, kami berharap konsep pilot project dari Pengelola Barang disusun dengan lebih matang. Persiapan, koordinasi, sampai dengan mitigasi resiko dan dampak-dampak pada bisnis proses lainnya juga harus diperhatikan. Bukan sekedar dijadikan bagian/ tahapan menuju implementasi regulasi secara nasional. Jika dimungkinkan, pilot project dapat diawali dengan scope/ objek yang lebih sempit yang tidak berdampak pada Pengguna Barang secara keseluruhan. Sehingga Pengguna Barang bisa lebih fokus pada tugas utamanya untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengelolaan BMN yang dikuasanya. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selalu berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi Pengelolaan BMN dan Manajemen BMN menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Teks: Agus Warsito

Foto: Jeri Martin



MANAJEMEN

Barang Milik Negara dan Pengadaan

STRATEGI DAN KINERJA

> Penataan Ruang Kerja *Activity Based Workplace*

- Target : sebanyak 612 unit yang direncanakan untuk dilakukan penataan ruang kerja dengan konsep ABW. (612 unit kerja adalah 69% dari 891 unit kerja yang ada di Kemenkeu)
- Realisasi ABW telah mencapai sebanyak 155 unit kerja atau sebesar 25,3% dari target.



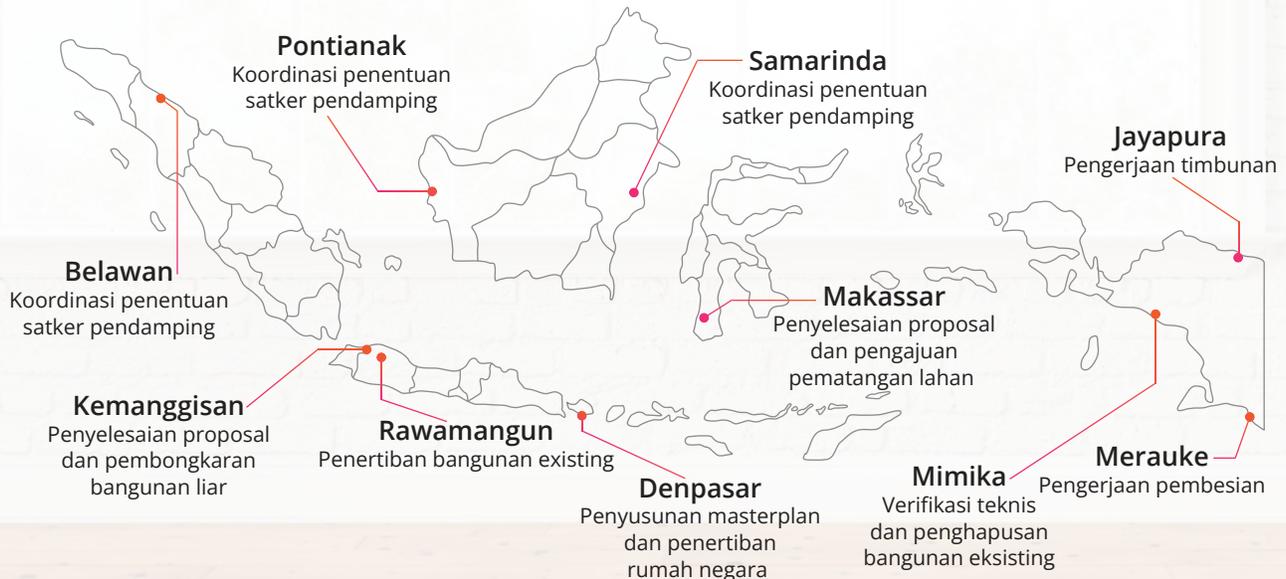
> Penggunaan Aset Bersama

- Data Realisasi Penggunaan Aset Bersama



PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA

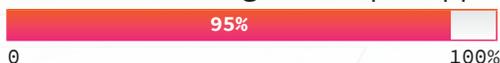
> Progres Pembangunan Rumah Susun Negara



TEKNOLOGI INFORMASI

> Super Apps Digitalisasi Aset

- Realisasi Pembangunan Super Apps



> Data Analitik Optimalisasi BMN

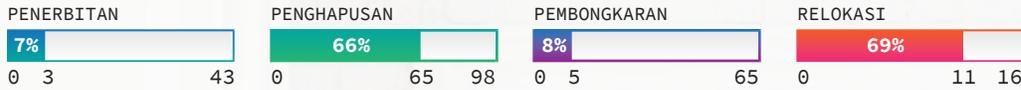
- Realisasi Data Analitik



PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

> Penataan Kawasan Renon

- Data Realisasi Penataan Kawasan Renon



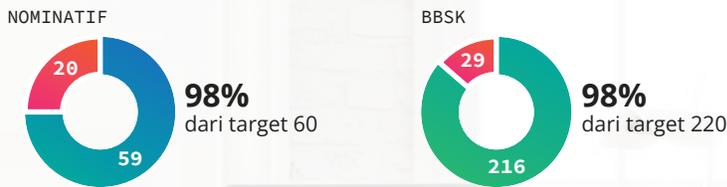
> Optimalisasi BMN Terindikasi Idle

- Data Realisasi Optimalisasi BMN Terindikasi Idle



> Sertifikasi Tanah

- Data Realisasi Sertifikasi Tanah



PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

> Pemenuhan Kebutuhan Aset IKN Nusantara

- Kebutuhan Ruang Kerja
- Kebutuhan Hunian

| Tahun | Pegawai | Kebutuhan (SBSK & SSSJ) |
|--------------|--------------------|------------------------------|
| 2024 | 4.875 orang | 127.744 m ² |
| >2024 | 5.085 orang | 17.616 m ² |
| Total | 9.960 orang | 145.360 m² |

| Pejabat | Tipe | LB | Kebutuhan | Dibangun |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| Menkeu | Rumah Tapak | 580 m ² | 1 rumah | 2024 |
| Wamen | Rumah Tapak | 490 m ² | 1 rumah | 2024 |
| Eselon I | Rumah Tapak | 390 m ² | 19 rumah | > 2024 |
| Eselon II | Rumah Susun | 290 m ² | 85 sarusun | > 2024 |
| Eselon III | Rumah Susun | 192 m ² | 286 sarusun | > 2024 |
| Jabfung & Staf lain | Rumah Susun | 98 m ² | 9568 sarusun | > 2024 |
| Total | 9.960 orang | 1.025.126 m² | 9960 unit | |

PENGADAAN BARANG/JASA

> Implementasi Produk Dalam Negeri

- Realisasi implementasi Produk Dalam Negeri (PDN) sampai saat ini mencapai Rp7,47 triliun dari target Rp6,29 triliun, atau sebesar 75%



> Sentralisasi Pengadaan Barang/Jasa

- Konsolidasi Access Point: telah disepakati PPK Konsolidator dan dilakukan permintaan nama tim per Unit Eselon I.

> Integrasi Gedung AA Maramis & Taman Lapangan Banteng

- Penjelasan desain rencana pengintegrasian Gedung A.A Maramis dan Taman Lapangan Banteng pada 3 Nov oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI, terdapat Konsep Integrasi Gedung A.A Maramis dan Taman Lapangan Banteng.

PENGHEMATAN ANGGARAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

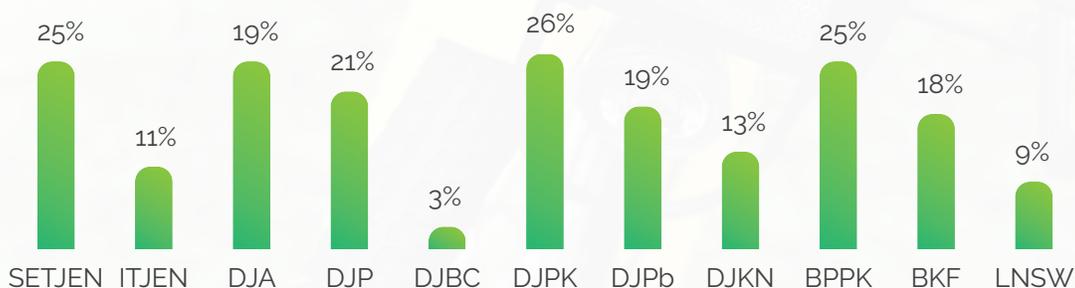
Penghematan = Pagu Anggaran - Nilai Kontrak

$$\text{Persentase Penghematan} = \left(\frac{\text{Nilai Penghematan}}{\text{Pagu Anggaran}} \right) \times 100 \%$$

Penghematan yang dihitung adalah penghematan dari paket lelang yang selesai dilaksanakan.

Σ pagu : 4,07 triliun
 Σ kontrak : 3,40 triliun

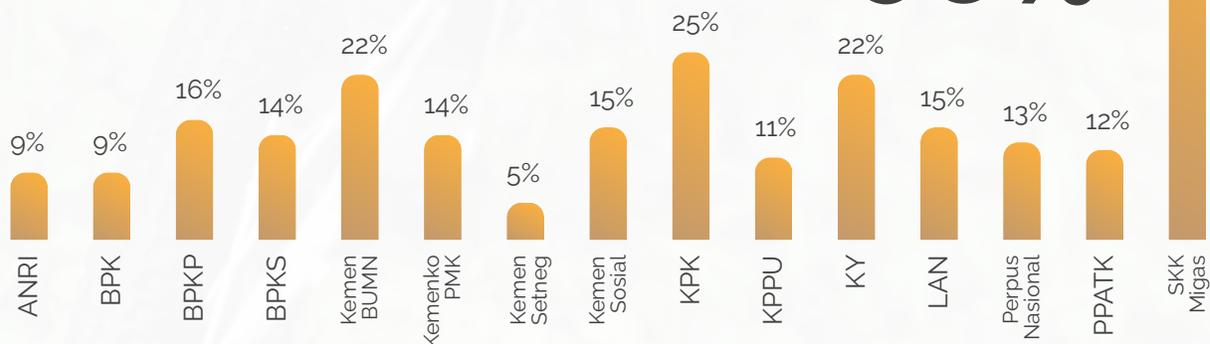
Total Penghematan
 Kementerian Keuangan
16%



Penghematan e-procurement Kementerian / Lembaga yang bekerja sama.

Σ pagu : 2,53 triliun
 Σ kontrak : 1,76 triliun

Total Penghematan
 Kementerian/Lembaga
30%





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PASTIKAN

Aset Kita

#LAYANAN TANPA BIAYA !



INDEKS KEPUASAN LAYANAN TAHUN 2021

Registrasi dan Verifikasi: **4.75/5**

Helpdesk (Call Center, Email, WhatsApp): **4.74/5**

Pelatihan Aplikasi Pengadaan: **4.71/5**

Asistensi Pengadaan: **4.91/5**

SANGAT PUAS



Call Center
134



WhatsApp (Chatbot)
0812 8367 6760



Email
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

#PastikanAsetKita #RomadanZIWbKWBBM

BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN

// ZONA
INTEGRITAS
Menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KALEIDOSKOP

Dalam mengelola keuangan negara dan menjaga pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan harus dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui peningkatan kinerja pegawainya. Perubahan budaya kerja dengan mengatur penataan ruang kerja untuk menunjang berbagai aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersifat kolaboratif dan nyaman bagi pegawai sehingga kinerja organisasi dapat meningkat.

Transformasi strategi dalam bekerja di Kemenkeu melalui penerapan konsep Activity Based Workplace (ABW) dengan pengaturan tata letak ruang yang mengedepankan fleksibilitas dan mobilitas dalam bekerja. Selama ini, pegawai Kemenkeu terbiasa dengan memiliki meja kerja kubikel yang terpisah dengan rekan kerja lainnya. Berbeda dengan pengaturan kantor kubikel yang cenderung terikat dengan satu tempat kerja yang dedicated, penataan ruang kerja berdasarkan ABW bersifat terbuka tanpa sekat dan menyediakan akses bagi pegawai untuk memilih tempat kerja yang sesuai dengan aktivitas pegawai pada saat tertentu sehingga pegawai dapat bekerja dengan fleksibel tanpa terikat pada satu tempat.

Saat ini, ABW telah diimplementasikan secara bertahap di lingkungan Kemenkeu. Bermula di tahun 2019 sebagai bentuk piloting,



dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya yang direncanakan hingga tahun 2024.

Penetapan Rencana Penahapan 2022-2024

ABW di setiap tahun dilaksanakan berdasarkan rencana penahapan yang disusun oleh masing-masing Sekretaris Unit Eselon I. Rencana penahapan meliputi daftar satuan kerja/unit kerja yang akan melaksanakan ABW dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan kesiapan satker/unit kerja, proyeksi jumlah pegawai, perubahan struktur organisasi dan kesiapan anggaran.

Pada triwulan I tahun 2022, telah ditetapkan rencana penahapan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sesuai hasil rapat pembahasan dengan masing-masing Unit Eselon I. Terdapat total 64 unit yang direncanakan akan melaksanakan ABW pada tahun 2022, 231 unit yang direncanakan akan

melaksanakan ABW pada tahun 2023, dan 178 unit yang direncanakan akan melaksanakan ABW pada tahun 2024.

Evaluasi Pelaksanaan Tahun-Tahun Lalu

Dalam kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2021, evaluasi pelaksanaan ABW dilakukan berdasarkan laporan dari setiap Unit Eselon I. Namun, di tahun 2022 dipandang perlu melakukan kunjungan fisik untuk memastikan bahwa unit yang melaksanakan ABW telah melakukan penataan ruang sesuai dengan konsep dan prinsip sebagaimana dalam KMK dan SE terkait ABW.

Kunjungan fisik dilaksanakan pada bulan Juli hingga Oktober 2022 ke beberapa satker yang telah melaksanakan ABW di tahun 2019-2021 dengan mengevaluasi fisik ruang kerja serta menerima informasi/masukan dari unit sebagai lesson learned atas pelaksanaan ABW.

MENGAWAL ABW PELAKSANAAN IMPLEMENTASI ACTIVITY-BASED WORKPLACE



Asistensi Rencana Penahapan Tahun 2022
Beriringan dengan melaksanakan kunjungan fisik dalam rangka monitoring dan evaluasi pada unit-unit yang telah melaksanakan ABW, dilakukan juga kunjungan fisik pada unit-unit yang masuk dalam penahapan ABW tahun

2022. Kunjungan fisik dilakukan sebagai bentuk monitoring kesiapan dan progress unit serta memastikan progres yang telah dilakukan unit sesuai dengan konsep ABW. Berdasarkan hasil monitoring dan asistensi sampai dengan Oktober 2022, terdapat 16 unit kerja yang telah

selesai melaksanakan penataan ruang kerja, 3 unit kerja yang mengajukan penundaan, serta 45 unit kerja lainnya masih dalam proses penataan ruang kerja.

Asistensi Rencana Pembangunan Gedung Kantor Tahun 2023

Pengadaan pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2023 perlu dilakukan persiapan dengan asistensi sejak dari tahap perencanaan pengadaan. Pada September, mulai dilakukan identifikasi data rencana pembangunan/ renovasi gedung tahun 2023 serta beberapa unit telah masuk pada tahapan perencanaan pengadaan sehingga mulai juga dilakukan asistensi dan reviu atas pekerjaan konsultan perencana. Asistensi yang telah dilakukan sejak bulan September yaitu rencana pembangunan gedung kantor kanwil DJPB Kalimantan Utara, Gedung JB Sumarlin dan Gedung Sunarjo Kolopaking serta gedung KPP Pratama Natar.

Kendala dalam Implementasi ABW

Kurangnya dukungan anggaran dalam penataan ruang kerja sesuai konsep ABW, menjadi tantangan bagi unit kerja. Terdapat unit yang dapat melakukan optimalisasi anggaran pemeliharaan gedung, namun unit yang tidak dapat melakukan optimalisasi anggaran harus melakukan penundaan.

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ABW, masih terdapat dedicated seat dan dedicated PC serta masih terdapat dedicated seat bagi pejabat dengan alasan/pertimbangan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Dengan adanya perubahan budaya kerja yang mengedepankan fleksibilitas dan mobilitas, perlu dukungan pemenuhan sarana IT yang optimal. Unit yang dalam pemenuhan sarana ITnya belum optimal, masih menggunakan kombinasi PC dan laptop.



Teks: Tantan Sapta

Foto: Indyashadi Satya

KALEIDOSKOP

PESONA GKN GEDUNG KEUANGAN NEGARA DI TIMUR INDONESIA

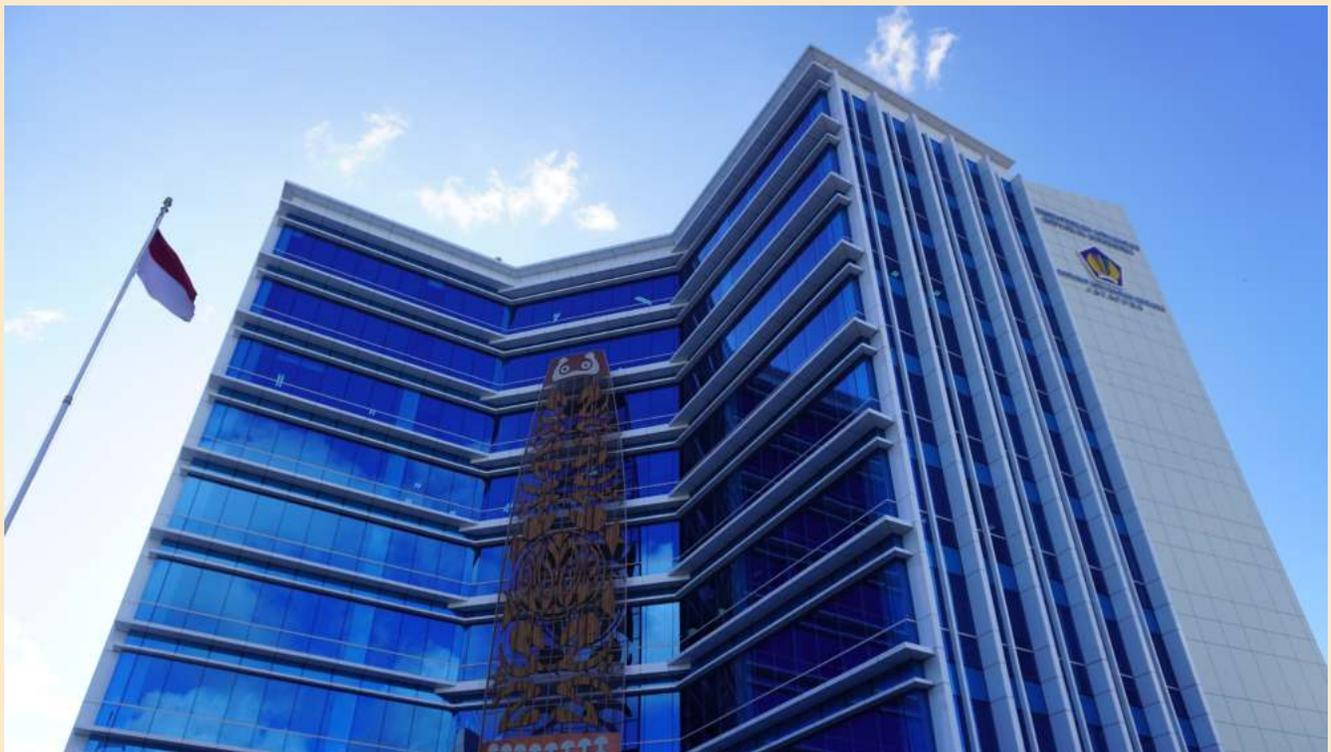
Gedung Keuangan Negara (GKN) adalah kantor perwakilan vertikal Kementerian Keuangan yang terletak di beberapa daerah di Indonesia. GKN memiliki tugas dan fungsi sebagai perwakilan Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan masyarakat serta penyelenggaraan urusan bidang keuangan dan kekayaan negara di daerah bersangkutan. GKN tersebar di beberapa ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota. Seluruh GKN tersebut secara administratif berada di bawah koordinasi unit Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Salah satu GKN tersebut terletak di Kota Jayapura yang berlokasi di Jl. Diponegoro Gurahbesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura. GKN Jayapura resmi beroperasi pada Jumat 26 November 2021, setelah diresmikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan gedung baru tersebut akan menjadi pusat pelaksanaan operasi keuangan negara di Papua serta kantor bersama bagi satuan kerja Kementerian Keuangan di Kota Jayapura.

Gedung 10 lantai yang dibangun selama tiga tahun dengan total dana Rp244 miliar seluas 111.400 m² tersebut, berdiri kokoh dengan desain modern berunsur the New Way of Working dan berdekorasi khas Papua.

Pada edisi kali ini, Tim Info Pasti melaksanakan kunjungan ke GKN Jayapura dan mewawancarai pengelola GKN Jayapura untuk bercerita dibalik pembangunan GKN Jayapura dan meminta testimoni dari para pegawai yang telah menempati dan berkantor pada GKN Jayapura.

Berdasarkan cerita dari pengelola GKN Jayapura yang diwakili oleh Kepala Subbagian Kepegawaian Kanwil DJPb Provinsi Papua, Pak Jung, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk satuan kerja GKN Jayapura dan Hafiza selaku Staf PPK, bahwa pembangunan GKN Jayapura telah dilakukan perencanaan Manajemen Konstruksi (MK) sejak tahun 2010, namun persiapan pembangunan terhenti karena terkendala aturan adat yang mana sudah





menjadi ciri khas proses pembangunan gedung/kantor di tanah Papua. Kendala tersebut membuat GKN Jayapura harus menyewa gedung kantor yang tersedia di Jayapura. Dari tahun 2012, GKN Jayapura menyewa rumah toko (ruko) Dok 2 yang terletak di area pusat niaga Jayapura dengan biaya sewa yang terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2018, pihak penyewa gedung memberi tarif sewa sebesar Rp12,5 miliar. Saat itu, rencana pembangunan GKN Jayapura mendapatkan harapan untuk dapat dilanjutkan kembali, sehingga GKN Jayapura memilih untuk pindah sewa gedung ke Papua Trade Center (PTC) di Entrop dengan tarif sewa Rp7,5 miliar.

Sejak tahun 2017, telah dimulai upaya penertiban tanah calon GKN Jayapura atas kendala aturan adat yang ada. Secara ringkas kendala tersebut ialah jika terdapat tanah kosong (tanpa bangunan) di daerah

Jayapura, maka suku asli Papua setempat akan mengakui atau klaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, meskipun secara dokumen pertanahan jelas milik Kemenkeu. Salah satu suku, yaitu Suku Ireu, melakukan klaim hingga menggugat atas calon tanah tersebut melalui jalur hukum dan ditetapkan kalah oleh Pengadilan Jayapura, namun terus berusaha hingga Mahkamah Agung dan masih ditetapkan kalah, gugatan-gugatan lain juga dilayangkan dari berbagai suku lain setempat. Cerita unik pengelolaan aset di tanah Papua ialah jika membeli tanah tidak termasuk pohon, tanaman, dan lain sebagainya. Terdapat cerita menarik pada saat awal pembangunan GKN Jayapura, ketika ground-breaking dilakukan upacara adat bersama Suku Kayu Pulau sekaligus kerja sama pengamanan pembangunan GKN Jayapura dengan melibatkan perwakilan keluarga suku untuk bekerja di proyek pembangunan. Upacara adat dilakukan di area pembangunan GKN Jayapura dan di pulau Suku Kayu Pulau. Prosesi upacara terdiri dari tari-tarian adat, pemotongan babi, penanaman kepala babi di area pembangunan GKN Jayapura, serta pesta upacara adat bersama Suku Kayu Pulau.

Singkat cerita, pelaksanaan konstruksi pembangunan GKN Jayapura telah selesai

menjelang akhir tahun 2021 dengan berakhirnya kontrak pada bulan Oktober. Pengerjaan interior dan penataan ruang kerja yang telah menerapkan Activity-Based Workplace pun dipercepat dalam rangka peresmian GKN Jayapura oleh Menteri Keuangan. Pada tanggal 26 November 2022, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bersama jajaran meresmikan GKN Jayapura yang dilaksanakan di Aula GKN Jayapura Lantai 8 dan juga disiarkan secara langsung melalui Youtube Kemenkeu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan apresiasi terhadap kualitas yang dihasilkan dalam pembangunan GKN Jayapura tersebut sudah lebih bagus dari gedung kantor yang berada di kantor pusat dan juga disampaikan apresiasi terhadap para pegawai Kemenkeu yang menangani pembangunan GKN Jayapura hingga selesai.

Dalam perencanaan pembangunannya, GKN Jayapura telah direncanakan untuk menerapkan konsep Activity-Based Workplace (ABW) bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan ABW di lingkungan Kemenkeu, sehingga penerapan non-dedicated seat, mobile working, dan open space langsung dapat diterapkan ketika para pegawai Kemenkeu di lingkungan Jayapura menempati GKN Jayapura. Selain itu, adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID) 19 yang terjadi di Indonesia juga mendorong para pegawai untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal melalui The New Way of Working dimana fleksibilitas dan kolaborasi menjadi unsur penting dalam budaya kerja Kemenkeu.



AGUSTUS



GKN Jayapura telah memiliki fasilitas ruang layanan bersama, ruang rapat bersama, ruang kerja bersama, dan fasilitas umum bersama lainnya, seperti masjid, kantin, dan rooftop yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kolaboratif di lingkungan GKN Jayapura. Upaya optimalisasi BMN di GKN Jayapura juga terus dimaksimalkan untuk mendorong Penggunaan BMN dan Pemanfaatan BMN menjadi lebih optimal dan efisien. Selain menjadi faktor utama penurunan biaya sewa gedung kantor untuk satuan kerja Kemenkeu di wilayah Jayapura pada tahun 2022, pembangunan GKN Jayapura juga dapat memfasilitasi beberapa satuan kerja pada instansi K/L/PD lain untuk dapat memanfaatkan ruang kerja, ruang rapat, aula, atau ruang kolaborasi lain di GKN Jayapura.

Menurut penuturan Arga Jonathan, salah satu pelaksana pada satuan kerja KPPN Tipe A1 Jayapura, dia merasa bangga dapat menempati GKN Jayapura yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih bagus dari gedung kantor pusat. Selain itu, fasilitasnya lebih lengkap dan memadai, dekat dengan rumah dinas, dan tidak jauh dari pusat kota Jayapura. Berdasarkan pengalaman Arga, saat kerusuhan di Jayapura tahun 2019, dimana GKN Jayapura masih menyewa di PTC, dia merasa

tidak aman karena berpotensi terjadi kerusuhan, namun GKN Jayapura yang baru ini dirasa lebih aman karena terletak di pusat kota dan dekat kantor Kepolisian. Arga menyampaikan ruang pelayanan KPPN Tipe A1 Jayapura, yang terletak di lantai 2 GKN Jayapura, menjadi lebih luas dan nyaman. Dengan GKN Jayapura yang sudah ABW, Arga merasakan ruang kerjanya sekarang lebih leluasa, dapat bekerja dimanapun, dan mengurangi tingkat stres. Saat peresmian, Arga bercerita setiap tamu yang hadir pasti berfoto dengan tampak muka GKN Jayapura yang indah dan estetik, selain itu di rooftop yang sering digunakan untuk kegiatan informal dapat melihat keindahan pemandangan lepas laut pada teluk yang dikelilingi kawasan pusat perkotaan Jayapura. Pada akhir wawancara, Arga berharap pemeliharaan GKN Jayapura untuk tetap dipertahankan dan penerapan ABW dapat diimplementasikan pada seluruh GKN di Indonesia.



M. Kurniawan Triatmojo turut menyampaikan bahwa GKN Jayapura memiliki bentuk gedung yang bagus dan besar, dengan fasilitas dan ruang kerja yang memadai dan lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Tri bercerita bahwa dia belum lama ini mutasi ke Kanwil DJKN Papua dan Maluku dan saat pertama kali sampai, GKN Jayapura melebihi ekspektasinya bahwa ternyata bangunan kantornya sudah bagus dan tertata rapi, dimana sebelumnya Tri merupakan pelaksana pada KPKNL Jakarta V yang belum ABW. Dengan penerapan ABW di GKN Jayapura, Tri merasa bekerja menjadi lebih fleksibel dan dapat bekerja dimana saja dengan fasilitas kerja yang lengkap, serta membuat koordinasi dan kolaborasi antar bidang hingga satuan kerja menjadi lebih mudah. Di akhir wawancara, Tri berharap GKN Jayapura dapat dilakukan penataan ruang kerja yang lebih terstruktur dan penerapan ABW dapat segera diimplementasikan di seluruh satuan kerja di Indonesia.



Berdasarkan pengalaman Ayun Primadani, salah satu pelaksana pada satuan kerja KPPBC TMP C Jayapura, selama setahun terakhir ini menempati GKN Jayapura terasa sangat nyaman, dengan gedung yang bagus, dan fasilitas yang sangat memadai untuk kinerja para pegawai. Ayun bercerita pada saat peresmian GKN Jayapura, dia merasa sangat bangga ketika melihat GKN Jayapura telah selesai terbangun dan menjadi gedung yang paling megah di Jayapura saat itu, ditambah fasilitas yang nyaman dan lahan parkir yang memadai. Ketika sebelumnya GKN Jayapura masih menyewa di Papua Trade Center, Ayun



merasa ruang kerjanya sempit dan bersekat yang membuat budaya kerja menjadi kurang terbuka satu sama lain. Lalu ketika sudah berkantor di GKN Jayapura yang sekarang merasa lebih lega dengan ruang kerja yang luas dan open space yang membuat suasana kerja menjadi lebih fresh dan nyaman, Ayun juga menuturkan meskipun ruang kerjanya lebih terbuka dan fleksibel, namun dia tetap bisa fokus dengan pekerjaannya dan tidak terganggu, apabila membutuhkan ruang yang lebih tenang juga terdapat ruang privasi atau ruang rapat.

Selanjutnya, Ayun menjelaskan bahwa untuk DJBC sendiri memang tidak bisa sepenuhnya menerapkan ABW, karena ada beberapa tugas dan fungsi sifatnya penjagaan atau harus stand by, seperti di bandara, pelabuhan, kantor pos, dan pos lintas batas negara. Terakhir, Ayun menyampaikan bahwa pengelolaan BMN di GKN Jayapura sudah cukup baik, namun setiap pegawai harus memperhatikan barangnya masing-masing karena non-dedicated seat dan juga harus menjaga BMN yang dibawa karena mobile working.

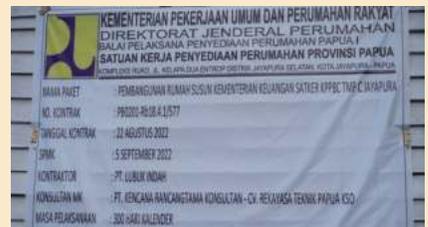
Pada tanggal 30 Agustus 2022, GKN Jayapura mendapatkan Piagam Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Gedung Keuangan Negara Pertama yang Menerapkan Konsep Activity-Based Workplace (ABW) dan diterima oleh Kepala Biro Umum, Sugeng Wardoyo.



Kepala Sekretariat GKN Jayapura, Pak M. Arief Barata, juga menyampaikan bahwa Gedung Keuangan Negara Jayapura telah menerapkan Activity-Based Workplace (ABW) sesuai arahan Menteri Keuangan. GKN Jayapura telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai GKN Pertama yang Menerapkan Konsep ABW. Dengan adanya ABW ini, kita dapat memanfaatkan BMN secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan ruang kerja menjadi lebih optimal dan budaya kerja kita menjadi lebih terbuka dan fleksibel. Mari kita terapkan ABW, untuk memanfaatkan BMN secara efektif dan efisien, serta terciptanya kolaborasi yang harmonis antar instansi di Kementerian Keuangan.



Selanjutnya diharapkan untuk pembangunan Rumah Susun Negara (Rusunara) Jayapura agar dapat terselesaikan segera di tahun 2023, sehingga para pegawai Kemenkeu di wilayah Jayapura dapat menikmati fasilitas perumahan dinas yang nyaman dengan fasilitas yang lengkap.



Teks: Irfan Murthado
Foto: Indyashadi Satya

SEGERA DIBANGUN RUMAH SUSUN PENGABDI NEGARA



Studi Banding Rusunara di “Parijs Van Bally”

Pekan ke-2 Agustus 2022 lalu, Tim Biromadan melakukan studi banding ke rusunara milik Kantor Imigrasi Klas I TPI Denpasar. Rusunara tersebut dibangun melalui mekanisme bantuan pembangunan oleh Kementerian PUPR. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapat gambaran umum mengenai pengelolaan rusun yang baik dan sesuai ketentuan. Dalam kegiatan ini, Tim Biro Madan juga didampingi perwakilan dari Biro Umum, Sekretariat DJP, KPTIK dan BMN Denpasar, Direktorat Rumah Susun (Kementerian PUPR),

serta Satker Pelaksana Penyedia Perumahan (P2P) Wilayah Jawa IV.

Pengelolaan rusunara pada Kantor Imigrasi Klas I TPI Denpasar masih dilaksanakan secara swadaya karena bangunan rusunara belum diserahkan (dialihkan status penggunaannya) dari KemenPUPR kepada Kemenkumham. Dalam implementasinya, Kantor Imigrasi Klas I TPI Denpasar akan membentuk tim khusus untuk melakukan pengelolaan rumah susun, yang bertugas untuk mengoordinasi pengelolaan rumah susun, menyusun tata tertib, dan sebagainya.

Di Kemenkeu sendiri, tata kelola rusunara telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.1/2021, di mana setiap rusunara memiliki Pejabat Penanggung Jawab Rumah Negara Berbentuk Rusunara yang menunjuk Manajemen Pengelola. Manajemen Pengelola inilah yang nanti akan bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian rusunara.

Teks: Efi Firmani

Foto: Ayu Damelia

TRANSFORMASI PERENCANAAN DARI KEBIJAKAN HINGGA APLIKASI

BMN
KALEIDOSKOP

Perbedaan besar SIMAN versi 1 dan versi 2 antara lain adalah terkait basis aplikasi, akses, dan role. Jika SIMAN versi 1 berbasis desktop dan menggunakan user yang didaftarkan ke haloDJKN, maka untuk SIMAN versi 2 berbasis web dan login menggunakan user SSO Kemenkeu. Selain itu, pada SIMAN versi 2 terdapat leveling role. Jika SIMAN versi 1 tidak ada leveling role, pada SIMAN 2 akan ada 3 role user di Pengguna Barang, yaitu Analis, Koordinator, dan Supervisor. Analis berperan sebagai penyusun, Koordinator berperan sebagai pemeriksa dan pemroses, dan Supervisor berperan sebagai pemeriksa dan pemberi persetujuan.

Merespon perubahan-perubahan yang terjadi, baik di sisi aturan maupun aplikasi, Biro Madan sepanjang 2022 telah melakukan langkah-langkah persiapan penyusunan RKBMN, antara lain yaitu: berkoordinasi dengan Pengelola Barang, mengikuti Training of Trainer (TOT) SIMAN versi 2, menyelenggarakan webinar, sosialisasi persiapan penyusunan, bimbingan teknis, dan piloting penyusunan RKBMN 2024.

Rangkaian kegiatan tersebut dibuka dengan webinar pengenalan di bulan Juni 2022,

dilanjutkan dengan testing aplikasi pada Agustus 2022 dan terus berlangsung sampai Desember 2022 mendatang. Biromadan menyadari bahwa kegiatan dimaksud merupakan langkah lanjutan transformasi pengelolaan aset sesuai dengan dinamika dan perubahan aturan perencanaan kebutuhan BMN. Diharapkan dengan rangkaian kegiatan

tersebut, satuan kerja dapat menyusun RKBMN menggunakan Aplikasi SIMAN versi 2 dengan baik sehingga penyusunan RKBMN dapat diimplementasikan dalam rangka akselerasi pengelolaan BMN nasional.

Teks: Efi Firmani

Foto: Ayu Damelia



AGUSTUS



Di penghujung tahun 2022 ini, seluruh mata dunia tertuju pada ajang Piala Dunia di Qatar. Masih teringat jelas kegembiraan Messi mengangkat piala dunia pertamanya, serta kegagalan Mbappe memenangkan piala dunia back-to-back-nya. Keberhasilan tim-tim 4 besar tak lepas dari peran gelandang-gelandang luar biasa seperti Tchouameni dari Perancis, Enzo Fernandes dari Argentina, Sofyan Amrabat dari Maroko, maupun Luka Modric dari Kroasia. Peran mereka sebagai gelandang begitu vital, dari mengatur tempo permainan, menciptakan peluang, hingga memberikan umpan-umpan ciamik untuk dikonversi menjadi gol.

Ibarat gelandang-gelandang yang menjadi jantung permainan tim, seperti itulah peran

dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya pada acara Puncak Perayaan Hari Jadi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ke-77, Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan fungsi kesetjanaan seperti para pemain gelandang yang memberikan umpan kepada striker. Dengan fungsi tersebut, kesetjanaan harus mampu memberikan dukungan kepada seluruh unit di Kemenkeu agar dapat mencapai goals/ tujuan yang hendak dicapai.

“Sebagai prime mover, fasilitator, integrator, dan sebagai mesin untuk kolaborasi, maka mesin itu harus tahu untuk apa diciptakan. Nah ini yang saya ingin harapkan sehingga temen-temen semua pada level Setjen, Eselon II sampai Eselon III, dan seluruh stafnya itu

memahami misinya dan kemudian bisa diterjemahkan ke dalam berbagai program,” lanjut Menkeu.

“Dirgahayu untuk Kesetjanaan Kemenkeu yang ke 77. Terima kasih atas upaya dan excitement Anda semuanya. Selamat berkolaborasi dan selamat terus menyatukan visi misi kita dan sinergi kita bersama. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Berikan yang terbaik terus dedikasikan apa yang anda miliki untuk terus membangun Republik Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat adil makmur dan bisa memberikan manfaat bagi rakyat dan bagi dunia,” tutup Menkeu.

HARI JADI SEKRETARIAT JENDERAL KOLABORASI BUDAYA KEMENKEU SATU

SEMARAK

SEPTEMBER

Rangkaian peringatan hari jadi Setjen Kemenkeu ke-77 dimulai dari 5 Agustus hingga 2 September 2022, dengan tema “Perkuat Kolaborasi Membangun Budaya Kemenkeu Satu”. Secara umum, keseluruhan kegiatan didesain untuk memperkuat sinergi kolaborasi dan kerjasama para pegawai di lingkungan Setjen. Harapannya, kebersamaan yang terjalin selama rangkaian kegiatan tidak hanya berhenti pada masing-masing kegiatan, namun menular hingga tahun tahun berikutnya dalam bekerja dan berkarya untuk Sekretariat Jenderal demi terwujudnya Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya.

Sejak tahun 1945, tanggal 2 September diperingati sebagai hari jadi Setjen Kemenkeu yang bermula dari terbentuknya organisasi Kemenkeu dengan lima pejabatan, yaitu Pejabatan Umum, Pejabatan Keuangan, Pejabatan Pajak, Pejabatan Resi Candu dan Garam, dan Pejabatan Pegadaian. Pejabatan Umum melaksanakan fungsi kesekretariatan hingga pada akhirnya berubah nama menjadi Kantor Pusat Kemenkeu. Unit organisasi ini yang kemudian kita kenal saat ini dengan nama Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

Adapun rangkaian kegiatan hari jadi Sekretariat Jenderal Kemenkeu ke-77 sebagai berikut:

1. Amazing Race, yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2022 setelah pembukaan yang merupakan perlombaan dimana setiap tim harus menyelesaikan tantangan yang diberikan panitia dan harus melalui

rute tertentu, dengan “clue” yang telah disiapkan. Amazing race diikuti oleh peserta dari 17 unit Eselon II di lingkungan Setjen dan terbagi dalam 13 tim yang terdiri dari campuran 17 unit Eselon II tersebut.



2. Webinar Satu, webinar terkait bela negara, dengan tema: “Merawat Rasa Kebangsaan ASN di Era Digital”
3. Expo Setjen, dengan kegiatan terdiri dari:
 - a. Expo Layanan dan Produk Kerja Setjen



- b. Bazaar Produk UMKM yang bekerja sama dengan Dharma Wanita Pusat Persatuan Setjen
 - c. Festival Lomba Rakyat
4. Lomba (Setjen Got Talent):
 - a. Kompetisi Setjen X Factor (Aneka Bakat)
 - b. Olahraga
 - c. Tiktok Seputar Setjen



5. Puncak Peringatan Hari Jadi Setjen Kemenkeu ke-77 pada 2 September 2022

Teks: Indyashadi Satya

Foto: M. Ibnu Sujono



Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, PBJ bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Tantangan bagi pemerintah antara lain tentang bagaimana memastikan mencapai value for money dari penggunaan anggaran negara. Konsolidasi pengadaan sebagai salah satu strategi pengadaan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam PBJ serta meningkatkan value for money. Kebijakan konsolidasi pengadaan diatur dalam Perpres 16/2018 tentang PBJ Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres 12/2021 beserta aturan turunannya. Konsolidasi PBJ adalah strategi PBJ yang menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis. Konsolidasi PBJ dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan PBJ melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.

Siapa yang berperan melaksanakan Konsolidasi Pengadaan? Pasal 9 ayat (1) huruf e Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 menyebutkan bahwa, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan Konsolidasi PBJ. Lalu pada Pasal 11 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam PBJ memiliki tugas melaksanakan Konsolidasi PBJ. Konsolidasi PBJ dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Strategi konsolidasi pengadaan saat ini sedang digalakkan, pada level nasional dikoordinasikan oleh LKPP, sedangkan pada level Kementerian Keuangan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. Konsolidasi pengadaan juga menjadi bagian dari ekosistem kerja Kemenkeu dengan istilah pengadaan bersama atau collaborative procurement.



Konsolidasi pengadaan dilakukan untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis yang dilihat dari Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan/atau komoditas) yang sama. Konsolidasi juga harus memperhatikan kondisi pasar pelaku usaha antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi pelaku usaha. Konsolidasi pengadaan cocok digunakan pada pengadaan yang sifatnya untuk kebutuhan rutin, barang standar, atau untuk kasus industri barang yang bukan untuk kebutuhan produksi.

Proses yang dilakukan dalam persiapan konsolidasi pengadaan yaitu:

1. Mengumpulkan data kebutuhan
 - a. Kebutuhan barang/jasa
 - b. Jumlah

- c. Waktu yang dibutuhkan
 - d. Perkiraan anggaran
2. Analisis pasar dan penyedia
 - a. Jumlah dan posisi penyedia
 - b. Syarat kualifikasi penyedia
 - c. Kapasitas produksi dan stok yang ada

Beberapa skenario konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:

1. Sejak dari sisi penganggaran yang merupakan bagian dari tahapan Perencanaan Pengadaan, dapat dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ;
2. Sejak dari tahapan Persiapan Pengadaan yang dapat dilakukan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ;
3. Sejak dari tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia yang dapat dilakukan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

**KONSOLIDASI BARANG
PENGADAAN JASA
DEMI WUJUDKAN KOLABORASI**

Nilai pemaketan hasil konsolidasi pengadaan tidak mengubah segmentasi pemaketan dari setiap paket yang dikonsolidasikan dan dibuat pengaturan terkait paket pekerjaan yang dapat dikonsolidasikan. Pelaksanaan konsolidasi melalui metode tender/seleksi dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang. Dalam hal menetapkan lebih dari 1 pemenang maka dapat menerapkan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan satu harga dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh pemenang yang diselaraskan dengan tujuan pengadaan yang mendukung tujuan program.

Kegiatan konsolidasi pengadaan dapat dilakukan pada beberapa tingkatan, baik di tingkat Kementerian, Unit Eselon I, Kantor Wilayah, regional tertentu hingga sebatas antar beberapa satuan kerja dan/atau beberapa PPK. Secara nasional, LKPP mengembangkan E-Marketplace berupa E-Katalog dan Toko Daring untuk mendukung pelaksanaan konsolidasi di tingkat nasional.

Sebagai gambaran tentang konsolidasi di antara yang telah dan sedang dilaksanakan baik secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sebagai berikut:

Konsolidasi Nasional

1. Konsolidasi pengadaan IT End User (laptop) telah dilakukan yang lalu keluar SE Kepala LKPP 9/2022 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun 2022
2. Diselenggarakan rapat koordinasi awal dengan LKPP dan beberapa K/L/I lainnya untuk membahas rencana konsolidasi Tiket Pesawat dan Tiket Hotel dan Collaboratif Work Software. Kedepannya akan terus dikembangkan untuk jenis barang/jasa lainnya seperti sewa/beli Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan/atau Kendaraan Dinas Jabatan (KDJ).

Konsolidasi di Kementerian Keuangan

1. Konsolidasi pengadaan IT End User (PC dan Laptop) via E-Katalog LKPP TA 2017
2. Konsolidasi pengadaan IT End User (PC dan Laptop) dalam bentuk Pengadaan Bersama mayoritas unit Kantor Pusat berbasis KMK dan KEP-CIO TA 2020
3. Konsolidasi pengadaan IT End User (PC dan Laptop) dalam bentuk konsolidasi anggaran melalui E Katalog LKPP berbasis KMK dan KEP-CIO TA 2021
4. Konsolidasi pengadaan server, komunikasi data (internet dan intranet), dan layanan data eksternal dalam bentuk konsolidasi anggaran melalui tender
5. Konsolidasi barang/jasa lainnya dalam skala yang lebih mikro baik di tingkat regional, Unit Eselon I, maupun antar Satuan Kerja yang berdekatan.

Penerapan konsolidasi pengadaan tetap harus memperhatikan batasan-batasan ketentuan tentang pemaketan, dalam pemaketan PBJ:

1. Dilarang menyatukan/memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di lokasi/daerah masing-masing.
2. Dilarang menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan.
3. Dilarang menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya

dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi.

Setiap K/L/Pemda wajib mengalokasikan 40% anggaran PBJ untuk memberikan kesempatan seluas mungkin untuk UMKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (mengutamakan penyedia UMKM setempat). Bahkan untuk Wilayah Indonesia Timur (Papua dan Papua Barat) mewajibkan penyedia harus Orang Asli Papua. Paket barang/jasa untuk UMKM mayoritas berupa paket Pengadaan Langsung dan/atau E-Katalog/Toko Daring umumnya berupa Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Rumah Tangga (ART), konsumsi dan jamuan rapat, souvenir, dan barang/jasa pendukung operasional perkantoran lainnya. Jenis barang/jasa ini tidak menjadi prioritas sebagai objek konsolidasi karena sudah di alokasikan untuk pengembangan UMKM dan optimalisasi penggunaan E-Marketplace.

Terakhir yang harus diingat adalah bahwa konsolidasi pengadaan merupakan suatu strategi dalam pengadaan, yang tujuannya adalah untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga SDM, serta mengoptimalkan jumlah/volume paket pengadaan sehingga buying power dapat meningkat, serta meningkatkan peluang dan inovasi dalam mendapatkan harga terbaik.

Teks: Daviq Suparwanto

Foto: M. Ibnu Sujono



ANUGERAH KINERJA PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN UPAYA PENINGKATAN AWARENESS DALAM MENJAGA DAN MENGELOLA ASET NEGARA

Dewasa ini pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tentu memiliki tantangan tersendiri turut dengan perkembangan zaman. Kementerian Keuangan terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien dan optimal. Hal ini harus didorong dari berbagai asepek baik regulasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten.

Sebagai manajer aset, peran kita dalam pengelolaan BMN meliputi siklus BMN yakni perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian.

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan sebagai Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, begitu juga dengan satuan kerja di lingkungan Kemenkeu sebagai Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Dengan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN ini tentu perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan BMN Kemenkeu, salah satu yang dilakukan oleh Biro Madan adalah dengan memberikan penghargaan bidang pengelolaan BMN secara berkala kepada para satuan kerja di lingkungan Kemenkeu.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 383/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenkeu,

telah ditetapkan pemberian penghargaan pengelolaan BMN dilaksanakan melalui penilaian kinerja pengelolaan BMN yaitu BMN Award yang dilaksanakan setiap tahun.

Dalam perkembangannya, untuk mendukung penguatan tata kelola organisasi dan pengembangan ekosistem kerja yang kondusif dan produktif telah ditetapkan KMK nomor 325/KMK.01/2022 tentang Sistem Penghargaan di Lingkungan Kemenkeu.

Sistem penghargaan di Kemenkeu ini ditetapkan dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenkeu yang berintegritas dan berkinerja tinggi, yang mencakup penyesuaian sistem, jenis, nama, bentuk dan lingkup penghargaan baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) / tenaga profesional, tim kerja, unit kerja, dan pihak lain yang mendukung tugas dan fungsi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara.

Penghargaan tersebut terdiri atas Penghargaan Nagara Dana Rakca, Penghargaan Nagara Dana Ksatria, Penghargaan Nagara Dana Abyakta, Penghargaan Tingkat Nasional, dan Penghargaan Nagara Dana Abisatya.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PASTIKAN
Aset Kita

KATEGORI

- ▼ Kualitas Perencanaan BMN
- ▼ Kualitas Utilisasi dan Optimalisasi BMN
- ▼ Kualitas Pengamanan BMN
- ▼ Kualitas Penghapusan BMN
- ▼ Kualitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN
- ▼ Kualitas Laporan BMN

PESERTA

Seluruh Satker selaku Kuasa Pengguna Barang tanpa melalui pendaftaran

SATKER KECIL
s.d 500 NUP

SATKER MENENGAH
501 s.d 1000 NUP

SATKER BESAR
> 1000 NUP

#PastikanAsetKita #RomadanZIWBKWBBM

BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGERA DAN PENGADAAN

BMN Awards 2022

pengelolaan BMN sesuai siklus BMN. Penilaian BMN Award pada tahun 2022 ini terdiri dari 6 (enam) kategori, yang diantaranya adalah:

1. Kategori Kualitas Perencanaan BMN
2. Kategori Kualitas Utilisasi dan Optimalisasi BMN
3. Kategori Kualitas Pengamanan BMN
4. Kategori Kualitas Penghapusan BMN
5. Kategori Kualitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN
6. Kategori Kualitas Laporan BMN

Peserta dari kegiatan ini adalah seluruh satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemenkeu, dengan tidak melalui pendaftaran. Adapun klasterisasi peserta terbagi 3 (tiga) klaster yakni:

1. Satuan Kerja Kecil (Klaster Satuan Kerja dengan Jumlah BMN Strategis sampai dengan 500 NUP)
2. Satuan Kerja Menengah (Klaster Satuan Kerja dengan Jumlah BMN Strategis 501 sampai dengan 1.000 NUP)
3. Satuan Kerja Besar (Klaster Satuan Kerja dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1.000 NUP)

Hasil akhir penilaian BMN Award: Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkeu Tahun 2022 diumumkan pada serangkaian kegiatan Hari Oeang ke-76 bulan Oktober 2022. Setiap kategori akan terdapat 3 (tiga) pemenang berdasarkan klasterisasi peserta yang akan diumumkan dalam Family Gathering Hari Oeang ke-76 di hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 dan 1 (satu) juara umum yang adalah Unit Eselon I dengan jumlah Kuasa Pengguna Barang paling banyak menjadi pemenang pada semua kategori yang akan diumumkan dalam Upacara Hari Oeang ke-76 di hari Senin tanggal 31 Oktober 2022.

Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkeu Tahun 2022, masuk ke dalam Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Tata Kelola yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemenkeu yang mempunyai prestasi/capaian yang menonjol pada bidang tertentu dan berdampak positif terhadap keuangan negara dan Kemenkeu, antara lain pada bidang budaya organisasi, bidang tatak kelola, bidang inovasi, bidang layanan, dan kinerja. Bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa piagam, plakat, piala, atau insentif bagi unit kerja.

BMN Award: Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkeu Tahun 2022

diselenggarakan oleh Biro Madan untuk memberikan penghargaan bagi para kepala satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Barang yang tertib terhadap pengelolaan BMN. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan awareness pada Kuasa Pengguna Barang terkait tanggung jawab pengelolaan BMN, tentu BMN Award juga mendorong kolaborasi Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang dalam pengelolaan BMN.

Penilaian BMN Award diarahkan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan pengelolaan BMN secara keseluruhan yang meliputi kinerja



KALEIDOSKOP

Berikut adalah daftar pemenang BMN Award: Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkeu Tahun 2022:

1. Kategori Kualitas Perencanaan BMN
 - Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis s.d. 500 NUP:
 - (a) Pusintek, (b) KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, (c) KPPN Jakarta I, (d) Kanwil DJKN DKI Jakarta, dan (e) Pusdiklat Pajak. Juara 1: Pusintek



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1.000 NUP:
 - (a) KPTIK BMN Denpasar, (b) KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, (c) KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan, (d) KPPBC TMP Tanjung Perak, dan (e) KPPBC TMP B Pontianak. Juara 1: KPTIK BMN Denpasar



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1.000 NUP:
 - (a) Kantor Pusat DJBC, (b) KPPBC TMP C Sampit, (c) Kantor Pusat DJPb, (d) Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, dan (e) PKN STAN. Juara 1: Kantor Pusat DJBC



2. Kategori Kualitas Utilisasi dan Optimalisasi BMN
 - Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis s.d. 500 NUP:
 - (a) GKN Jayapura, (b) KPP Pratama Jakarta Pulogadung, (c) KPP Pratama Cibitung,

(d) KPPN Semarang I, dan (e) KPPN Palangkaraya. Juara 1: KPPN Semarang I



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1.000 NUP:
 - (a) Kanwil DJP Nusa Tenggara, (b) KPP Pratama Pontianak Barat, (c) KPPBC TMP A Semarang, (d) KPPN Cirebon, dan (e) KPPN Singkawang. Juara 1: KPP Pratama Pontianak Barat



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1.000 NUP:
 - (a) Kanwil DJP Jawa Timur III, (b) Kanwil DJBC Sumatera Utara, (c) KPU BC Tanjung Priok, (d) KPPBC TMP A Tangerang, dan (e) KPPBC TMP C Labuan Bajo. Juara 1: Kanwil DJBC Sumatera Utara



3. Kategori Kualitas Pengamanan BMN
 - Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis s.d. 500 NUP:
 - (a) KPPBC TMP C Tasikmalaya, (b) KPPN Banjarnegara, (c) KPPN Tanjung Pandan, (d) KPPN Liwa, dan (e) KPPN Sumbawa Besar. Juara 1: KPPN Sumbawa Besar



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1.000 NUP:

(a) KPPN Dumai, (b) KPPN Baturaja, (c) KPPN Singkawang, (d) KPPN Pelaihari, dan (e) KPPN Amlapura. Juara 1: KPPN Pelaihari



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1.000 NUP:
 - (a) KPPBC TMP C Teluk Bayur, (b) KPPBC TMP Merak, (c) KPPBC TMP A Tangerang, (d) Kanwil DJPb Provinsi Aceh, dan (e) Kanwil DJPb Provinsi Banten. Juara 1: Kanwil DJPb Provinsi Aceh



4. Kategori Kualitas Penghapusan BMN
 - Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis s.d. 500 NUP:
 - a. Kanwil DJP Jakarta Selatan I
 - b. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
 - c. KPP Pratama Singosari
 - d. KPP Madya Makassar
 - e. KPPN Pekanbaru
 Juara 1: KPP Pratama Singosari



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1.000 NUP:
 - a. KPP Pratama Bintan
 - b. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun
 - c. KPP Pratama Jakarta Tebet
 - d. KPPN Kuala Tungkal
 - e. BDK Balikpapan
 Juara 1: KPP Pratama Tanjung Balai Karimun



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1.000 NUP: (a) Inspektorat Jenderal, (b) KPP Pratama Bantaeng, (c) Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, (d) KPPBC TMP C Labuan Bajo, dan (e) PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun. Juara 1: KPP Pratama Bantaeng



- Kategori Kualitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN
 - Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis s.d. 500 NUP: (a) KPPN Curup, (b) KPPN Bandar Lampung, (c) KPPN Jakarta III, (d) KPPN Makassar I, dan (e) KPPN Manokwari. Juara 1: KPPN Manokwari



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1.000 NUP: (a) KPPN Langsa, (b) KPPN Muara Bungo, (c) KPPN Kuala Tungkal, (d) KPPN Ketapang, dan (e) KPPN Marisa. Juara 1: KPPN Langsa



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1.000 NUP: (a) Kanwil DJBC Banten, (b) KPPBC TMP

C Kuala Tanjung, (c) KPPBC TMP C Sumbawa, (d) KPPBC TMP C Biak, dan (e) KPPN Bogor. Juara 1: KPPBC TMP C Kuala Tanjung



- Kategori Kualitas Laporan BMN
 - Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis s.d. 500 NUP: (a) KPPN Medan II, (b) KPPN Jambi, (c) KPPN Curup, (d) KPPN Benteng, dan (e) KPKNL Ambon. Juara 1: KPPN Benteng



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1.000 NUP: (a) KPPN Rantau Prapat, (b) KPPN Kuala Tungkal, (c) KPPN Metro, (d) KPPN Pangkalan Bun, dan (e) KPPN Waingapu. Juara 1: KPPN Metro



- Nominasi untuk Klaster Satker dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1.000 NUP: (a) GKN Banda Aceh, (b) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, (c) Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, (d) KPPN Bogor, dan (e) KPPN Merauke. Juara 1: Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo



Juara Umum BMN Award Tahun 2022 adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Pemenang BMN Award Tahun 2022 ditetapkan melalui KMK nomor 430/KMK.01/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Di lingkungan Kemenkeu Tahun 2022.

Keluarga besar Biro Madan memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja atas kinerja terbaik dalam pengelolaan BMN, hingga memperoleh juara dalam BMN Award: Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkeu Tahun 2022



Edy Gunawan, kepala Biro Madan mengharapkan agar setiap pemenang dapat memaknai penghargaan ini bukan hanya sekadar sebagai plakat penghargaan, namun juga sebagai sebuah upaya membangun kultur menjaga dan mengelola aset negara sebagai bagian dari pertanggung jawaban publik kepada masyarakat Indonesia.

Teks: Jeri Martin

Foto: Irfan Murtadho

KALEIDOSKOP PROSES PENGADAAN JASA PCO PROFESSIONAL CONFERENCE ORGANIZER PADA G20 INDONESIA TAHUN 2022

Indonesia mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh, dimulai dari Desember 2021 hingga November 2022. Serah terima presidensi dari Italia (selaku Presidensi G20 2021) kepada Indonesia sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Pertemuan Presidensi G20 Tahun 2022 di Indonesia mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger”, dimana Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk saling mendukung pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam G20 Indonesia 2022, Kementerian Keuangan berkesempatan mengelola pertemuan jalur keuangan bersama dengan Bank Indonesia. Pertemuan ini dilaksanakan di dalam dan luar negeri dengan format acara hybrid/offline/online disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19.

Kemenkeu berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan presidensi G20 dengan melakukan pengadaan barang/jasa khususnya jasa Professional Conference Organizer (PCO) dalam rangka mendukung banyak kegiatan dalam penyelenggaraan presidensi G20

bidang finance track 2022. Berdasarkan data Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Indonesia sebagai negara 4 terbesar yang menjalankan bidang jasa lainnya khususnya PCO. Pengadaan Jasa PCO merupakan jasa lainnya. Menurut Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengadaan jasa Lainnya meliputi:



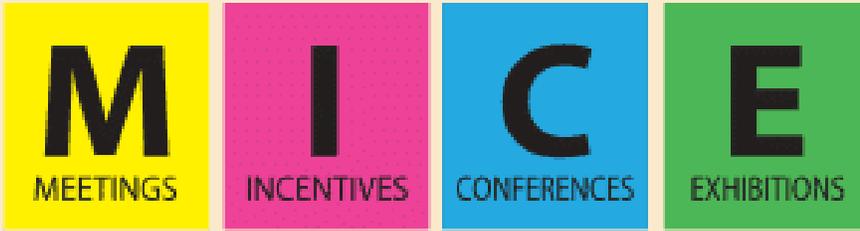


1. jasa boga (catering service)
2. jasa layanan kebersihan (cleaning service)
3. jasa penyedia tenaga kerja
4. jasa asuransi, perbankan dan keuangan
5. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan
6. jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan
7. jasa percetakan dan penjilidan
8. jasa pemeliharaan/perbaikan
9. jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi
10. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang
11. jasa penjahitan/konveksi
12. jasa impor/ekspor
13. jasa penulisan dan penerjemahan
14. jasa penyewaan
15. jasa penyelaman
16. jasa akomodasi
17. jasa angkutan penumpang
18. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan
19. jasa penyelenggaraan acara (event organizer)
20. jasa pengamanan
21. jasa layanan internet
22. jasa pos dan telekomunikasi
23. jasa pengelolaan aset

PCO merupakan suatu badan hukum, perorangan, sekelompok yang diberi tugas untuk mensukseskan perencanaan, promosi, persiapan, penyelenggaraan, penilaian, dan pertanggungjawaban/penyelesaian suatu konvensi secara profesional. PCO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan konferensi. PCO bertindak sebagai konsultan bagi suatu organisasi yang berkewajiban melaksanakan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Ruang lingkup

pekerjaan yang dilakukan oleh PCO untuk mendukung Logistik dan Penyelenggaraan Presidensi G20 Bidang Finance Tracks ini terdiri dari:

1. Melakukan pengorganisasian kegiatan
2. Merencanakan keseluruhan acara
3. Membuat budget anggaran
4. Menyusun meeting plan
5. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
6. Menyediakan tenaga sumber daya manusia yang dibutuhkan
7. Melakukan instalasi peralatan dan perlengkapan
8. Melaksanakan program komunikasi publik
9. Menyiapkan dokumentasi foto dan video pelaksanaan kegiatan
10. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan



Salah satu yang menjadi syarat Kualifikasi administrasi/legalitas pemilihan penyedia PCO pada presidensi G20 ini adalah memiliki kode kualifikasi usaha KBLI dengan bidang penyelenggaraan pertemuan, insentif perjalanan, konferensi dan pameran MICE. Meeting, Incentive travel, Convention and Exhibition (MICE) yaitu penyelenggaraan acara yang membutuhkan keterampilan khusus saat acara berlangsung

1. Meeting Travel artinya pertemuan dalam jumlah audience yang sedikit.
2. Incentive Travel artinya dilakukan oleh perusahaan swasta
3. Convention artinya pertemuan seseorang untuk melakukan diskusi
4. Exhibition artinya acara yang mawadahi penjual dan pembeli.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Standar Usaha MICE melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 28 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran. Dalam industri pariwisata atau pameran, MICE adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan

dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu.

Beberapa contoh perusahaan PCO antara lain: Royalindo Expoduta, Pactoconvex niagamata, Dyandra Promosindo, Exponent Media Visi dan lainnya.

Jenis kontrak untuk barang/konstruksi/jasa lainnya:

1. Kontrak Lumsum yaitu, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai

dengan kontrak. Contohnya: pengadaan kendaraan bermotor pengadaan aplikasi komputer.

2. Kontrak Harga Satuan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani; pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Contohnya: obat-obatan, Jasa Boga Pasien di Rumah Sakit.
3. Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Contohnya: Jasa Profesional Conference Organizer (PCO), Pekerjaan konstruksi.
4. Kontrak Terima Jadi (Turnkey), jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. Contohnya: Pabrik es, Pembangkit listrik
5. Kontrak Payung, untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Contohnya: Kendaraan bermotor, Peralatan komputer.





Pengadaan Jasa Lainnya menggunakan metode pemilihan E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Tender dan penunjukan langsung, serta tender cepat. Metode evaluasi jasa lainnya menggunakan metode Sistem nilai, Penilaian Biaya Selama umur ekonomis dan Harga Terendah. Untuk pelaksanaan tender PCO yang dilakukan pada presidensi G20 Kementerian Keuangan, metode pemilihan yang digunakan adalah tender dengan pascakualifikasi harga terendah system gugur. Biasanya ada beberapa syarat dalam kualifikasi yang menjadi sorotan untuk menyaring penyedia dalam rangka mendapatkan penyedia yang berkualitas dan kompeten seperti, memiliki pengalaman sekurangnya 3 event internasional minimal setingkat Menteri, Kepala Negara dengan partisipasi paling kurang 5 lima Menteri negara asing atau pejabat setingkat Menteri dan dihadiri langsung oleh Presiden RI atau Wakil Presiden RI atau memiliki pengalaman menyelenggarakan pertemuan konferensi internasional minimal setingkat Minister.

Pengadaan Jasa PCO dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada unit instansi terkait berdasarkan permintaan pengadaan dari user atau pemberi tugas untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan dan merealisasikan proyek atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dengan harga yang wajar

dan dapat dipertanggungjawabkan. PCO perlu memahami komunikasi yang baik dan lancar agar acara berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk mensukseskan suatu acara tidak hanya didukung oleh perencanaan acara namun perlu didukung oleh teknologi informasi.

Pada pelaksanaan tender PCO beberapa terjadi tender gagal, yang disebabkan oleh banyak penawaran yang gugur pada tahap kualifikasi, misalnya, penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada SPSE. Selain itu, ada penawaran yang gugur teknis karena penyedia tidak membaca secara teliti dan memahami isi dokumen pengadaan, penyedia tidak menggunakan fasilitas pemberian penjelasan untuk mengetahui hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau ragu dalam membuat dokumen penawaran. Pengalaman perusahaan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan tidak sesuai, Pengalaman tenaga ahli yang disyaratkan tidak sesuai atau kurang



memenuhi, dokumen penawaran tidak lengkap juga alasan gugurnya penawaran.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tender PCO:

1. PPK hendaknya sudah memastikan syarat yang akan di cantumkan dalam dokumen pengadaan dapat menghasilkan output yang diinginkan dan penyedia sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut.
2. Penyedia hendaknya memahami persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, penyedia dapat menggunakan fasilitas pemberian penjelasan yang diberikan oleh Pokja Pemilihan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengupload dokumen pengadaan atau tidak terpenuhinya syarat yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Pastikan membaca dengan teliti dokumen pengadaan khususnya lembar data pemilihan, Kerangka Acuan Kerja dan Lembar data kualifikasi. Tidak lupa pastikan harga penawaran yang di upload merupakan harga yang kompetitif.
3. Terkait dengan aspek usaha, PPK dan entitas pengadaan bersama-sama menggarap pasar yang ada dan melakukan edukasi agar bisnis dalam bidang jasa PCO semakin menarik prospeknya. Sehingga banyak penyedia yang mengikuti tender PCO.

Teks: Yelly Metasari

Foto: google.com, Beby Vizca

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pencatatan BMN, Kementerian Keuangan akan melakukan kegiatan inventarisasi dalam bentuk Sensus BMN di tahun 2023. Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 (PMK181/2016) tentang Penatausahaan BMN, setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk melakukan kegiatan sensus BMN sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Sensus BMN adalah Kegiatan Pendataan, Pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan BMN selain persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Secara umum, sensus BMN dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kondisi BMN pada saat dilakukannya kegiatan tersebut. Hasil sensus akan memetakan eksistensi BMN sesuai dengan kondisinya (Baik, Rusak Ringan dan Rusak Berat), BMN berlebih serta BMN tidak ditemukan. Tindak lanjut atas hasil sensus BMN dilakukan dengan pertimbangan kerangka aturan terkait baik dari

SENSUS **BMN** TERTIB PENATAUSAHAAN

aspek penatausahaan BMN maupun aspek pengelolaan BMN lain. Informasi hasil sensus BMN dapat juga menjadi pijakan rumusan kerangka teknis penyelesaian permasalahan pengelolaan BMN yang melingkupinya.

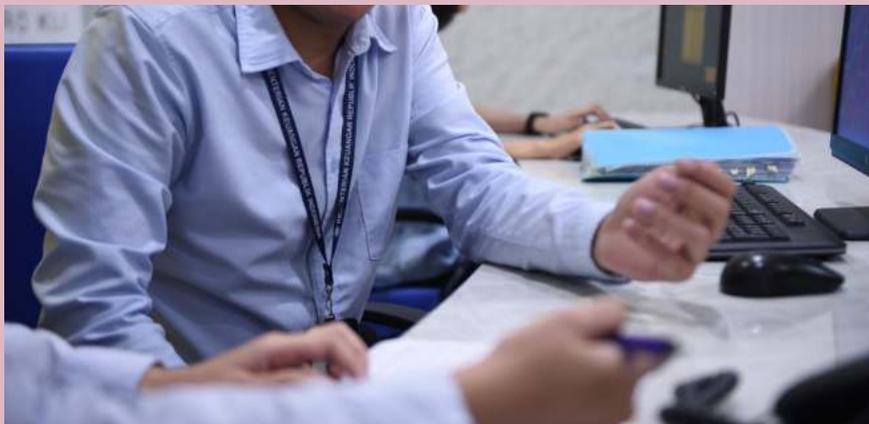
Sensus BMN di lingkungan Kemenkeu pertama kali dilakukan pada tahun 2007 dalam kegiatan Inventarisasi dan Penilaian yang diinisiasi oleh DJKN selaku Pengelola Barang. Lima tahun berikutnya, pada tahun 2012-2013 Kemenkeu melakukan kegiatan sensus BMN secara mandiri. Di tahun 2017, DJKN selaku Pengelola

Barang melakukan kegiatan revaluasi BMN yang didalamnya juga terdapat kegiatan inventarisasi terhadap aset-aset tertentu sesuai dengan ketentuan dalam revaluasi BMN. Pada tahun 2018, Kemenkeu melakukan kegiatan sensus BMN secara mandiri. Pada periode ini, pelaksanaan sensus BMN dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama telah dilakukan pada tahun 2018 terhadap BMN yang mempunyai Kartu Identitas Barang (KIB) dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2017. Di tahap kedua, pada tahun 2019 ini dilakukan sensus BMN untuk BMN non-KIB dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2018.

Sensus BMN selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2023 oleh seluruh satker Kemenkeu yang memiliki objek sensus BMN dengan tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Hasil sensus dilaporkan maksimal tanggal 15 Desember 2023.

Pelaksanaan sensus BMN akan dilaksanakan melalui aplikasi SIMAN mobile berbasis android dan SIMAN versi 2 modul inventarisasi. Dalam rangka persiapan sensus BMN tahun 2023, pada tahun 2022 Biro Madan selaku pengguna barang telah melakukan kegiatan piloting sensus BMN pada 4 (empat) satker piloting Kemenkeu yaitu Kanwil DJP Nusa Tenggara, KPPN Tipe A1 Bandung I, Kantor Pusat DJKN, dan BDK Denpasar. Pada kegiatan piloting sensus BMN tersebut setiap satker diharapkan dapat mencoba melaksanakan proses sensus dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, monitoring





hingga tahap pelaporan. Dengan adanya kegiatan piloting sensus ini diharapkan satker piloting mendapatkan pengalaman dalam melakukan sensus serta kendala dan masalah yang dihadapi oleh satker dapat segera ditangani dan dimitigasi sehingga proses persiapan sensus 2023 dapat lebih baik dan berjalan lancar.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sensus tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh satker di lingkungan Kemenkeu yaitu mulai melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang terdapat dalam masing-masing ruangan. Satker dapat melakukan cetak dan penempelan label yang diperoleh dari Master Aset SIMAN. Selanjutnya, Satker dapat melakukan update referensi data ruangan. Update referensi data

ruangan dilakukan pada master asset SIMAN. Setiap satker yang memiliki bangunan gedung wajib melakukan updating data, sementara bagi satuan yang tidak mempunyai gedung, namun menempati gedung milik satker lain sesama Kemenkeu, wajib melakukan pendataan ruangan. Untuk updating data ruangan pada aplikasi SIMAN, dilakukan oleh satker pemilik gedung. Satuan kerja yang menempati bangunan gedung milik pihak ketiga atau satker lain di luar Kemenkeu, maka tidak perlu melakukan updating data ruangan pada aplikasi SIMAN. Namun, wajib melengkapi isian referensi pada isian ruangan pihak ketiga (modul inventarisasi).

Terhadap BMN yang memiliki kondisi rusak berat, Satker dapat melakukan usul pemindahan atau penghapusan BMN. BMN berupa tanah,

bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diusulkan penghapusan kepada Biro Madan, sementara penghapusan BMN berupa persediaan, aset tetap lainnya (hewan, ikan, dan tanaman) dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000 karena sebab-sebab lain dapat diajukan penghapusan kepada Sekretaris Unit Eselon I masing-masing.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan sensus BMN dan menjamin kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil sensus, masing-masing satker diminta untuk membentuk tim pelaksana sensus. SK Tim pelaksana sensus nantinya akan diunggah pada aplikasi SIMAN v2 modul inventarisasi dengan isian antara lain nomor dan tanggal SK Tim serta nama ketua dan anggota tim sensus BMN. Anggota tim sensus dapat terdiri dari pejabat/pegawai yang bekerja pada unit tersebut dan dapat dibantu oleh PPNPN pada satker tersebut.

Pelaksanaan sensus BMN tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2023 dengan didukung oleh kesiapan alat bantu sensus SIMAN versi 2 modul inventarisasi yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya, selama dalam proses pelaksanaan sensus BMN akan dilakukan monitoring secara berkala pada satker secara berjenjang sehingga penyampaian pelaporan sensus BMN dapat dilakukan tepat waktu. Data hasil pelaksanaan sensus BMN akan memperbaharui data master aset sehingga data menjadi lebih lengkap dan valid. Dengan data master aset yang lengkap dan valid akan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkeu serta menjadi pijakan rumusan kerangka teknis pengelolaan BMN yang melingkupinya.

Teks: Kiki Meliza

Foto: Indyashadi Satya





Dalam rangka memperkuat hubungan dengan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (Kementerian ESDM), Kementerian Keuangan telah melakukan inisiasi Nota Kesepahaman dengan Kementerian ESDM dalam hal sinergi tugas dan fungsi. Dalam menjalankan perannya,

Kementerian Keuangan mengajak Kementerian ESDM untuk menjaga keberlangsungan sinergi kebijakan antar Kementerian. Yang mana tugas Kementerian Keuangan ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan, tugas Kementerian ESDM ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

PERKUAT HUBUNGAN KERJA SAMA DENGAN KEMENTERIAN ESDM

DESEMBER

DENGAN

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

#SejutaSuryaAtap

Mendorong tercapainya 23% penggunaan energi terbarukan pada tahun 2025, dengan mempercepat pembangunan PLTS Atap di perumahan, fasilitas umum, gedung perkantoran/pemerintahan, bangunan komersial, dan kompleks industri.

- Menghemat konsumsi BBM** (untuk bahan bakar pembangkit)
- Mengurangi emisi gas rumah kaca** dengan penggunaan energi bersih
- Mendorong pengembangan bisnis dan industri panel surya**, percepatan pemanfaatan energi surya

SUMBER ENERGI LEBIH BERSIH

esdm.go.id

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerja sama dibidang energi terutama dalam hal penugasan pemerintah. Salah satunya ialah penugasan yang memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimal 30% di seluruh gedung dan/atau bangunan Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017. Penerapan konsep ini juga sejalan dengan pemberlakuan Eco-Office dengan memperkaya pemanfaatan energi terbarukan dalam penggunaan listrik kantor. Eco-Office itu sendiri merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mewujudkan kantor yang ramah lingkungan dengan terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman. Penerapan Eco-Office salah satunya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Perundingan terhadap ruang lingkup dilaksanakan pada bulan Agustus 2022,

dan sebagaimana yang disepakati, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan dari tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Pelaksanaan perundingan Nota

Kesepahaman ini dilakukan secara one-on-one meeting secara langsung antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

Saat ini, perancangan Nota Kesepahaman ini telah sampai pada tahap finalisasi. Pada tahap finalisasi ini, perlu dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum dari masing-masing Kementerian. Diharapkan penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022.

Pada tahap implementasi, Nota Kesepahaman ini nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan bagi Perjanjian Kerja Sama yang akan dibentuk antara masing-masing satuan kerja dalam Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Sehingga, dengan adanya Nota Kesepahaman ini dapat mempermudah komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara bersama-sama, khususnya dalam hal ini terkait implementasi Eco-Office dalam pemanfaatan sel surya sebagai sumber energi cadangan gedung kantor melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Teks: M. Ibnu Sujono

Foto: pexels.com, ebtke.esdm.go.id





PASTIKAN
Aset Kita
Galeri
MANAJEMEN BMM



**ANUGERAH
REKSA BANDHA**

PENGADAAN



PENGEMBANGAN SDM



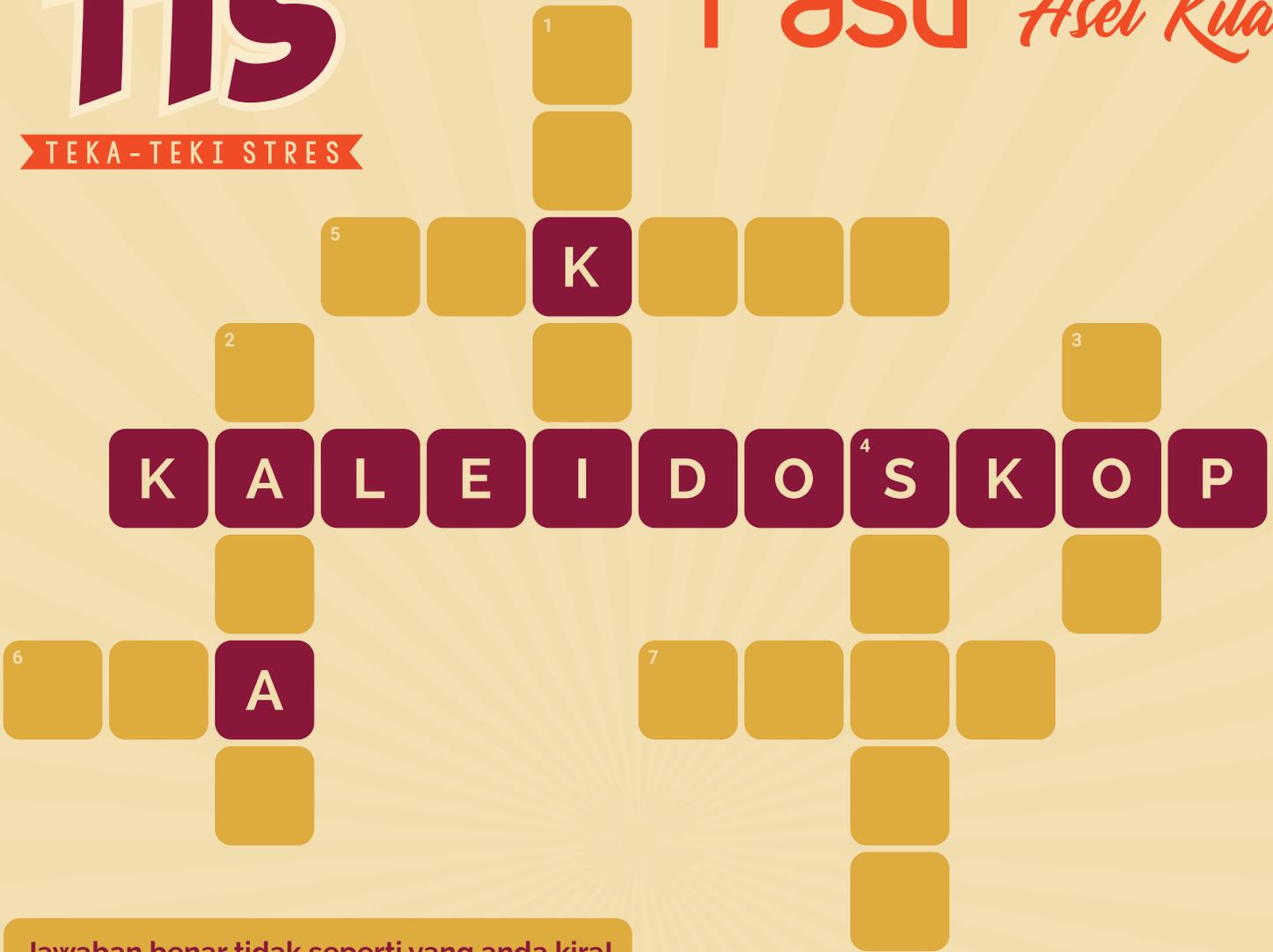
Foto: Irfan Murtadho



TEKA-TEKI STRES

info Pasti

PASTIKAN Aset Kita



Jawaban benar tidak seperti yang anda kira!

MENURUN

- 1. Yang dinaikkan pemerintah sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024 adalah ...
- 2. Koran disebut surat ...
- 3. Agar tampil maksimal, penyanyi biasanya melakukan cek ...
- 4. Jalan bebas hambatan ...

MENDATAR

- 5. Untuk menyalakan lampu kita harus memencet ...
- 6. Dalam pertandingan sepakbola, Timnas Indonesia biasanya disingkat ...
- 7. Lokasi diselenggarakannya KTT Presidensi G20 tahun 2022 pasti ...

TATA CARA PENGIRIMAN JAWABAN



isikan jawabanmu pada halaman ini, lalu screenshot hasil isian jawabanmu



upload jawabanmu di Instagram Story kamu, lalu tag @pastikanasetkita



pengirim jawaban paling/hampir benar akan mendapatkan souvenir menarik



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PASTIKAN

Aset Kita

#LAYANAN TANPA BIAYA !



INDEKS KEPUASAN LAYANAN TAHUN 2021

Registrasi dan Verifikasi: **4.75/5**

Helpdesk (Call Center, Email, WhatsApp): **4.74/5**

Pelatihan Aplikasi Pengadaan: **4.71/5**

Asistensi Pengadaan: **4.91/5**

SANGAT PUAS



Call Center
134



WhatsApp (Chatbot)
0812 8367 6760



Email
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

#PastikanAsetKita #RomadanZIWbKWBBM

BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN

// ZONA
INTEGRITAS
Menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

www.romadan.kemenkeu.go.id

info Pasti[✓]

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI